

**KESIAPAN KPH DOLAGO TANGGUNUNG DALAM  
PENERAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL  
DI DESA BAKUBAKULU KABUPATEN SIGI**

*THE PREPAREDNESS OF KPH DOLAGO  
TANGGUNUNG IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL  
FORESTRY POLICY  
IN BAKUBAKULU VILLAGE, SIGI REGENCY*

**TESIS**

**INGGRID MARGARETH POSSUMAH**  
**E 202 15 042**



**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2019**

**KESIAPAN KPH DOLAGO TANGGUNUNG DALAM  
PENERAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL  
DI DESA BAKUBAKULU KABUPATEN SIGI**

***THE PREPAREDNESS OF KPH DOLAGO  
TANGGUNUNG IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL  
FORESTRY POLICY  
IN BAKUBAKULU VILLAGE SIGI REGENCY***

**INGGRID MARGARETH POSSUMAH  
E 202 15 042**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Pertanian  
Program Studi Ilmu**



**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
PALU  
2019**

**PENGESAHAN**

**KESIAPAN KPH DOLAGO TANGGUNUNG DALAM  
PENERAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL  
DI DESA BAKUBAKULU KABUPATEN SIGI**

Oleh  
**Inggrid Margareth Possumah**  
Nomor Stambuk : E20215042

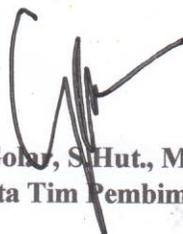
**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Magister Pertanian  
Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian,

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini,

Palu, 19 April 2018

  
(Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc.)  
Ketua Tim Pembimbing

  
(Dr. Gohar, S.Hut., M.Si.)  
Anggota Tim Pembimbing

Mengetahui,

  
(Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, M.Si.)  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Tadulako

  
(Dr. Ir. Hafsah, M.Sc.)  
Koordinator Program Studi  
Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana megister atau doktor) baik di Universitas Tadulako maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni penelitian, rumusan dan gagasan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan dalam daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palu, 21 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



INGGRID MARGARETH POSSUMAH

E 202 15 042

## **ABSTRAK**

Inggrid Margareth Possumah E 202 15 042. Kesiapan KPH Dolago Tanggunung Dalam Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial Di Desa Bakubakulu Kabupaten Sigi. (Pembimbing Adam Malik dan Golar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan KPH Dolago Tanggunung di dalam penerapan kebijakan perhutanan sosial, serta mengetahui kesiapan masyarakat terhadap pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Penelitian ini dilakukan di Desa Kilo Kecamatan Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan September sampai dengan November 2016. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, melalui penskalaan 1-3-5 (Modifikasi Skala Likert). Parameter yang diukur adalah kesiapan KPH dalam pelaksanaan tata batas kawasan, inventarisasi hutan meliputi: status, penggunaan dan penutupan lahan, iklim, sumberdaya manusia dan demografi, jenis sebaran flora, jenis populasi dan habitat fauna, kondisi sosial ekonomi, pembagian blok (karakteristik biofisik lapangan, potensi SDA, keberadaan hak atau ijin usaha dan pemanfaatan), pembagian blok meliputi: produktivitas dan potensi areal, rancangan areal untuk pemanfaatan. Sedangkan dari sisi kesiapan masyarakat dinilai berdasarkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPH Dolago Tanggunung tergolong siap dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial, dibuktikan oleh terpenuhinya sejumlah kriteria dan indikator kesiapan KPH. Sementara itu, masyarakat juga tergolong sangat siap dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan tingkat pemahaman dan respon terhadap keterlibatan mereka di dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Kesiapan KPH, Kesiapan Masyarakat

## **ABSTRACT**

Inggrid Margareth Possumah E 202 15 042. The Preparedness of KPH Dolago Tanggunung In Implementation of Social Forestry Policy in Bakubakulu Village, Sigi Regency. (Supervised by Adam Malik dan Golar).

This study aims to determine the preparedness of KPH Dolago Tanggunung in the implementation of social forestry policy, and to know the preparedness of the community toward forest management through social forestry scheme. This research was conducted at Kilo Village, Sigi District, Central Sulawesi Province from September up to November 2016. Data were analyzed using qualitative approach, through scaling 1-3-5 ( Modified Likert Scale). The parameters which were measured were the FMU's readiness in the implementation of the boundary structure, forest inventory covering: status, use and land cover, climate, human resources and demography, species of flora distribution, population type and fauna habitat, socioeconomic conditions, block division ( biophysical characteristics field, potential of natural resources, the existence of rights or business permits and utilization), the division of the block includes: productivity and potential of the area, the design of the area for utilization while from the preparedness of the community was assessed based on understanding and community involvement itself. The result of the research showed that KPH Dolago Tanggunung was very ready toward the implementation of Social Forestry policy that can be proved by the fulfillment of several criteria and indicators of KPH readiness. Meanwhile, the community was also well-prepared in the management of Community Forest based on the level of understanding and response to their involvement in the implementation of the program.

Keywords: Social forestry, KPH preparedness, community preparedness.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Selama proses penulisan Tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu disampaikan ucapan terima kasih kepada: Dr. Ir. Adam Malik M. Sc sebagai Ketua Tim dan Dr. Golar S. Hut, M.Si sebagai anggota Tim pembimbing yang dengan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan mulai dari penulisan proposal sampai dengan penulisan Tesis ini. Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS selaku Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Tadulako. Prof. Dr. Ir. Fathurrahman , MP, Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister. Dr. Ir. Hafisah, M.Sc, Koordinator Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian yang selalu memberikan dorongan penuh dengan wawasan dan ide-ide yang membantu dalam upaya penyelesaian penulisan Tesis ini.

Seluruh Dosen Pascasarjana Ilmu-Ilmu Pertanian yang telah memberikan bekal bagi penulis melalui materi-materi kuliah terstruktur dan sistematis dan sangat memadai sehingga bermanfaat serta bernilai guna yang tinggi dalam mendukung penulisan Tesis ini. Juga kepada seluruh staf administrasi yang dengan tulus ikhlas melayanikeperluan penulis selama perkuliahan dan penulisan Tesis ini. Ketua Tim dan anggota Tim Penguji Tesis yang telah memberikan solusi, saran dan masukan yang bermanfaat guna perbaikan Tesis ini.

Kepala UPT KPH Dolago Tanggunung dan Kelompok Tani serta masyarakat di Desa Bakubakulu yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di areal Perhutanan Sosial dan mendapatkan data informasi lainnya untuk kelancaran penulisan tesis ini.

Tersitimewa untuk Ayahanda Patrich Frederich Possumah S.Hut MSi dan Ibunda Alti Marande yang telah memberikan dukungan, semangat dan dorongan penuh teriringi doa kepada penulis selama menempuh pendidikan ini bahkan seribu terima kasih pun tak cukup untuk membalas kasihmu.

Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Angkatan 2015 yang selalu tulus ikhlas dan saling membantu di dalam menempuh pendidikan di Program Magister Universitas Tadulako ini. Akhirnya dengan iringan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai setiap langkah kaki kita . Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan IPTEK di bidang Kehutanan.

Palu,                      Februari 2018  
Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA DAN HIPOTESIS</b>	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kajian Pustaka	8
2.2.1. Kebijakan Perhutanan Sosial	8
2.2.2. Pemanfaatan Hutan	8
2.2.3. Pengertian Kesiapan KPH	10
2.2.4. Pengertian Kesiapan Masyarakat	15
2.2.5. Kelompok Tani	17
2.2.6. Pembentukan Kelompok Tani	17

2.3. Kerangka Pemikiran	20
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	<b>21</b>
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3. Populasi	23
3.4. Operasionalisasi Variabel	24
3.5. Jenis dan Sumber Data	26
3.6. Teknik Ppengumpulan Data	27
3.7. Instrumen Penelitian	27
3.8. Teknik Analisis Data	27
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>32</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi	32
4.1.1. Luas, Batas, Wilayah dan Jumlah Penduduk	32
4.1.2. Letak dan Luas Wilayah KPH	
4.1.3. Akseibilitas Kawasan	34
4.1.4. Sejarah Wilayah KPH	35
4.2. Hasil	37
4.2.1. Kesiapan KPH	37
4.2.2. Tata Batas Kawasan	38
4.2.3. Inventarisasi Hutan	39
4.2.4. Pembagian Blok	66
4.2.5. Pembagian Petak	78
4.2.6. Kesiapan Masyarakat	81
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel Halaman

1. Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Dolago Tanggunung	36
2. Sistem Lahan	48
3. Kondisi Topografi	52
4. Kondisi Penutupan Lahan/Vegetasi	54
5. Jenis-Jenis Hasil Hutan Non Kayu di Wilayah KPHP Model Tanggunung	63
6. Jenis-Jenis Flora Langka Endemik dan Dilindungi di Wilayah Model Dolago Tanggunung	65
7. Pembagian Blok Pada Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunug	66
8. Pembagian Blok Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Dolago Tanggunung	68
9. Fungsi dan Luas Kawasan Hutan	77
10. Pembagian Blok Pada Wilayah KPHL dan KPHP	80

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar Halaman**

1. Bagan Alir Penelitian

33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perhutanan sosial diartikan berbeda-beda oleh berbagai pihak. Di beberapa negara perhutanan sosial (*social forestry*) dianggap sebagai payung dari berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Contohnya di Cina perhutanan sosial dianggap bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen sosial. Dalam hal ini kata sosial melibatkan semua pihak termasuk swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas atau lembaga penelitian dan masyarakat sendiri (Awang, 2002).

Hal yang sama diutarakan oleh Yuniati (2012) bahwa Perhutanan Sosial diartikan juga sebagai sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan. Perhutanan sosial ada yang sudah dikembangkan secara tradisional di berbagai daerah seperti Repong Damar di Sumatera, Simpung di Kalimantan, kane atau hutan keluarga di Timor maupun yang diperkenalkan oleh pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, PHBM dan sebagainya. Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai

pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal dan tujuan produksi yang lestari.

Pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat dapat juga dijadikan acuan bahwa pengelolaan hutan jika diserahkan kepada masyarakat maka hasilnya lebih optimal dan maksimal, seperti yang termuat dilaman berita online Tirto.id, yang berjudul Sumbar Layak Dijadikan Contoh Pengelolaan Perhutanan Sosial. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) layak menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial. Terjaganya Hutan Nasional itu menurutnya karena pengelolaan diserahkan kepada masyarakat setempat. Menurutnya, dengan pengelolaan kepada masyarakat maka pengawasan terhadap hutan akan lebih maksimal daripada diserahkan ke perusahaan dan pengelolaan hutan tanpa melibatkan peran masyarakat maka penjagaan hutan akan terkendala karena masyarakatlah yang dekat dengan hutan. Oleh sebab itu pihaknya mendukung pengelolaan hutan diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lahan perkebunan sambil menjaga kelestarian hutan. Dan juga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat.

Menurut Rahardjo (2002) tujuan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Membangun perhutanan sosial menjadi salah satu andalan usaha rakyat. Sehingga menambah jenis usaha dan pendapatan
2. Meningkatkan teknologi dan manajemen organisasi masyarakat lokal dalam melakukan perhutanan sosial

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan, dan mencoba meningkatkan ekonomi disekitar hutan
4. Melestarikan hutan tanpa adanya tekanan dan menjaga hutan dengan iming-iming sama - sama untung baik masyarakat maupun hutan yang dijaga
5. Adanya tingkatan sediaan sumber daya kehutanan bagi pengembangan sektor hutan yang semakin luas. Hal ini terbentuk dari keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar.
6. Bersama memerangi pembalakan liar atau pemanfaatan hutan untuk pribadi, sehingga masyarakat sekitar dapat melakukan hal tersebut dan berharap pembalakan liar hutan akan berkurang. Mengingat hutan di Indonesia semakin berkurang.

Di sisi lain menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perhutanan Sosial bahwa Perhutanan Sosial merupakan upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat, dalam kawasan hutan melalui Pengelolaan Hutan Desa atau izin usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, atau Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rangka berkontribusi terhadap berkurangnya ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan hutan, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan serta perlindungan dan pemulihan ekosistem menuju kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu kesiapan masyarakat merupakan pondasi yang sangat berpengaruh guna

keberhasilan program tersebut. Selain itu masyarakat harus didukung oleh para stakeholders salah satunya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH harus mendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

KPH harus mempersiapkan dari tahap awal sampai akhir seperti penetapan wilayah, kesiapan kelembagaan, rencana pengelolaan hutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tersebut. Sedangkan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan HKm dapat dilihat dari segi pemahaman masyarakat, respon serta dukungan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kesiapan KPH dan kesiapan masyarakat harus seimbang agar terciptanya program-program atau blok pemberdayaan masyarakat yang berhasil atau sukses.

KPHP Model Dolago Tanggunung yang merupakan gabungan KPHP Unit IX dan KPHL Unit VI, terletak di wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.755/MENHUT-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas  $\pm$  144.349 Ha dengan rincian Hutan Lindung seluas  $\pm$  67.794 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm$  57.548 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm$  19.008 Ha.

Rencana pengelolaan KPHP Model Dolago Tanggunung ke depan diarahkan pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan di kawasan hutan lindung. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi meliputi: (a) Pemanfaatan hasil hutan kayu

dari hutan alam (HHK-HA), (b) Pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (HHK-HT), (c) Pemanfaatan kawasan; (d) Pemanfaatan jasa lingkungan (Jasling) dan (e) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Selanjutnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung meliputi: (a) Pemanfaatan jasa lingkungan (Jasling) dan (b) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Desa Bakubakulu adalah salah satu desa yang akan dilaksanakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Desa yang berada disekitar hutan dengan luas wilayah 348,45Ha dengan wilayah yang berbukit-bukit dengan curah hujan 4470 mm dengan suhu rata-rata 30-34 derajat celcius dengan ketinggian 660m dari permukaan laut, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatas: dengan kawasan Hutan
- Sebelah Timur berbatas: dengan Desa Bobo/Bunga
- Sebelah Selatan berbatas: dengan hutan penyanggah Taman Nasional Lore Lindu
- Sebelah barat berbatas: dengan Desa Sigimpu 2.

Keadaan jumlah penduduk Desa Bakubakulu pada akhir tahun 2010 sesuai dengan hasil permuktahiran data pada buku profil desa sejumlah 1328 jiwa dengan jumlah KK 372, laki-laki berjumlah 745 orang dan perempuan berjumlah 583 orang dengan kepadatan penduduk 7orang/km. Desa ini menjadi salah satu lokasi penerapan Perhutanan Sosial oleh KPH Dolago Tanggunung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berhasil atau tidaknya suatu suatu program, ikut ditentukan oleh tingkat kesiapan pelaksanaannya. Seperti halnya pada Rencana Pengelolaan Hutan di KPH Dolago Tanggunung yang menerapkan skema Perhutanan Sosial di Desa Bakubakulu, maka dalam hal ini kesiapan KPH dan kesiapan masyarakatlah yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan kebijakannya. Atas dasar uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah “ bagaimana kebijakan perhutanan sosial diintegrasikan pada Rencana Pengelolaan Hutan di KPH Dolago Tanggunung dalam bentuk program Hutan Kemasyarakatan (Km)”.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesiapan KPH Dolago Tanggunung dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial
2. Mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini agar mengetahui sejauhmana peran penting dari KPH Dolago Tanggunung dalam menerapkan program Perhutanan Sosial sesuai dengan kebijakan perhutanan sosial serta kesiapan masyarakat itu sendiri.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penulis mencari sumber pustaka dari hasil penelitian sebelumnya untuk dijadikan data pendukung dalam menunjang penelitian tingkat kesiapan KPH Dolago Tanggunung dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Bakubakulu .

Elvida (2009) melakukan penelitian Implementasi dan Strategi Pembangunan Kestauan Pengelolaan Hutan di KPH Banjar. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah mengidentifikasi permasalahan yang meliputi faktor eksternal dan internal yang berpengaruh pada pembangunan KPH dan mengkaji implementasi serta strategi pembangunan KPH . Jenis penelitian ini adalah rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey lapangan dan wawancara mendalam di KPH Model Banjar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan KPH Banjar, masih terdapat perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dari hasil SWOT yang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami beberapa kasus permasalahan dalam pembangunan KPH antara Dishut Provinsi, Dishut Kabupaten dan BPKH.

Sumanto 2009 melakukan penelitian tentang Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengembangan Perhutanan Sosial pada masyarakat sekitar hutan atau kelompok tani. Hasilnya, eksistensi dan dinamika masyarakat sekitar hutan berlangsung tidak seimbang yang menyebabkan kawasan hutan mengalami tekanan, ancaman dan sangat rentan. Adanya ancaman dan kondisi yang rentan itu tak serta merta mengharuskan pihak pengelola meniadakan komponen yang mengancam tersebut. Pada hakikatnya, penetapan kawasan hutan mengandung perbedaan peran antara aktor pengelola dan masyarakat, sehingga secara alamiah keduanya bisa saling berbeda pandangan, persepsi atau tindakan terhadap sumber daya hutan. Hal ini menjadi sebab dan sumber terjadinya konflik pengelolaan hutan.

Inggrid (2015) melakukan penelitian tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan masyarakat serta persepsi dan sikap masyarakat di sekitar hutan. Dan hasilnya adalah masyarakat siap dalam pengelolaan HKM dengan meliputi 3 aspek yaitu: kesiapan biofisik, kesiapan kelembagaan dan kesiapan masyarakat.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Kebijakan Perhutanan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial tentang Perhutanan Sosial dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah Hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

### **2.2.2 Pemanfaatan Hutan**

Menurut Permen LHK Nomor 83 Pasal 1, Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, dan pemasaran. Berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah Izin Usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.

Pada dasarnya masyarakat sekitar hutan atau masyarakat setempatlah yang memanfaatkan hutan tersebut. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau yang bermukim di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.

### **2.2.3 Kesiapan KPH**

Menurut PP No. 6 Tahun 2007 adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan idealnya seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH, yang menjadi bahagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Sebenarnya ide mengenai KPH sudah berlangsung lama, sejak UU Pokok-Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967 (UU No.5/1967) terbit. Namun pada masa itu, KPH diartikan sebagai kesatuan pemangkuan hutan sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa. Di dalam pasal 10 UU No.5/1967 disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengurusan Hutan Negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan - kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pada saat ini pengembangan KPH adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan kawasan hutan Indonesia yang sudah mulai berada dalam kondisi kritis. Selama ini kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak ijin pengelolaan, berada dibawah pengurusan Dinas Kehutanan tanpa pengelolaan riil di tingkat tapak. Kondisi ini dapat mengakibatkan pemanfaatan hutan tidak optimal dan rawan terjadi pengrusakan terhadap kawasan hutan.

Tujuan pembangunan KPH adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan;
2. kemantapan dan kepastian kawasan hutan;
3. distribusi manfaat sumber daya hutan bagi para pihak yang berkepentingan dengan sektor kehutanan.

Menurut Elvida (2009) KPH harus memiliki prinsip, prinsip atau azas atau dasar diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan lain-lain. Membangun KPH (termasuk mengoperasionalkan KPH) harus memiliki prinsip. Prinsip-prinsip ini dapat menuntun pengelola dalam menyusun rencana pengelolaan yang logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan (lestari). Mari kita cermati, prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam pembangunan KPH:

1. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan

Prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam konsep KPH adalah berkaitan dengan penetapan wilayah KPH. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi habis dalam wilayah-wilayah KPH dan akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Wilayah KPH dapat dievaluasi untuk kepentingan efisiensi, efektivitas serta

adanya perubahan tata ruang. Dalam satu wilayah KPH, dapat mencakup lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

## 2. Kelestarian Pengelolaan hutan secara lestari

Konteks KPH akan dapat menjamin keberlangsungan ekologi, ekonomi dan sosial fungsi hutan yang diharapkan dapat meminimalisasi masalah degradasi dan deforestasi hutan, masalah lingkungan dan sosial di KPH. Penerapan prinsip-prinsip kelestarian dalam pembangunan KPH ini terutama dalam konteks operasionalisasinya yang dapat berimplikasi pada terjaganya ekosistem hutan secara optimal. Prinsip-prinsip kelestarian pembangunan KPH tersebut meliputi kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial.

## 3. Keadilan

Prinsip keadilan dalam pembangunan KPH berkaitan dengan distribusi manfaat sumber daya hutan bagi para pemanfaat sumber daya hutan. Pemanfaat sumber daya hutan dapat berupa sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik (lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat. Pengelolaan hutan harus dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pemanfaat hutan dalam mengakses sumber daya hutan.

## 4. Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam pembangunan KPH berkaitan dengan peran KPH terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui skema kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan. Skema kegiatan pengelolaan hutan ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat setempat yang dapat dilakukan melalui kemitraan kehutanan. Skema ini dapat berupa hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), dan skema lain yang memungkinkan masyarakat mendapatkan izin usaha di bidang kehutanan

#### **2.2.4 Kesiapan Masyarakat**

Ada beberapa hal yang harus di perlukan dalam melaksanakan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, antara lain :

1. Pencadangan areal HKm atau HD. Dapat dicadangkan pada kawasan hutan produksi, kawasan lindung, dan pada pelestarian alam pada zona pemanfaatan
2. Penyiapan kondisi masyarakat. Merupakan kegiatan awal yang penting dilaksanakan sebelum pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan
3. Terbentuknya kelembagaan masyarakat berdasarkan aspirasi dan inisiatif masyarakat itu sendiri dalam mengelola hutan secara lestari. Penyiapan kondisi masyarakat dilakukan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan dan peraturan hutan kemasyarakatan
4. Perencanaan. Rencana pengembangan HKm atau HD diawali dengan diperolehnya hak pengusahaan hutan tersebut, koperasi masyarakat lokal wajib menyusun Rencana

Induk Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RPHKm), Rencana Lima Tahunan Hutan Kemasyarakatan (RKLHKm) .

5. Pelaksanaan. Hutan kemasyarakatan dikelola oleh koperasi masyarakat lokal sebagai pemegang hak pengusahaan hutan kemasyarakatan.

6. Pemantauan dan evaluasi di lapangan. Sebagai pemegang hak pengusahaan hutan kemasyarakatan, koperasi memantau sendiri kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (Inggrid,2015).

Menurut Joko Sutisno (2007) mengungkapkan bahwa kesiapan kerja diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan tanpa mengalami kesulitan, hambatan, dengan hasil maksimal, dan target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai kesiapan kerja, mereka akan mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut sesuai harapan tanpa mengalami kesulitan dan hambatan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja adalah suatu kemampuan dan perilaku seseorang yang diperlukan setiap pekerjaan baik bagi orang yang sudah bekerjamaupun yang belum bekerja. Selain itu pengertian kesiapan adalah berfokus pada sifat-sifat pribadi, seperti sifat pekerja dan mekanisme pertahanan yang dibutuhkan, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan suatu pekerjaan (Brady, 2009).

Namun dalam program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, kesiapan-kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan dalam penetapan areal kerja HKM seperti kesesuaian lahan dan jenis tanah, kesiapan masyarakat dari segi kelembagaan, kesiapan masyarakat dari segi ekonomi (ketergantungan masyarakat) serta tata kelola desa tersebut (Inggrid, 2015).

### **2.2.5 Kelompok Tani**

#### **a. Pengertian Kelompok Tani**

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan diluar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.

Maksud pembinaan KTH adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan dan usaha, dengan tujuan untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.(Solaiman, 2014).

#### **b. Karakteristik KTH**

Asas dan Ciri

KTH memiliki asas antara lain :

- a. Kekeluargaan
- b. Kerjasama
- c. Kesetaraan

- d. Partisipatif
- e. Keswadayaan

Adapun ciri dari KTH antara lain :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang kehutanan
- b. Ketergantungan terhadap hutan dan/atau komoditas kehutanan sebagai sumber kehidupannya
- c. Tujuan bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian melalui usaha dibidang kehutanan.

#### **c. Fungsi KTH**

KTH memiliki fungsi sebagai media :

- a. Pembelajaran masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas anggota
- c. Pemecahan permasalahan
- d. Pengembangan usaha produktif, pengolahan dan pemasaran hasil hutan
- e. Peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

#### **d. Kegiatan KTH**

Bidang kegiatan KTH berkaitan dengan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam yang meliputi kegiatan antara lain :

- a. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
- b. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

- c. Hutan Rakyat (HR)
- d. Pembibitan tanaman kehutanan
- e. Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan
- f. Agroforestry/silvopasture/silvofishery
- g. Pemanfaatan jasa lingkungan
- h. Pemanfaatan kawasan hutan
- i. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
- j. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
- k. Pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai.

#### **2.2.6 Pembentukan Kelompok Tani**

Menurut Adi Riyanto (2011), tahapan-tahapan dalam membentuk dan mengembangkan suatu kelompok masyarakat atau kelompok tani yaitu:

- a. **Tahap Memulai**(*Initiating*), merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan dalam menginformasikan dan memperkenalkan “apa sebenarnya kelompok itu”, “apa keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok”, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar petani sadar (*aware*) dan tergugah minatnya (*interest*) dan terbuka wawasannya (*understanding*). Tahap ini sangat berkaitan dengan persepsi dan kesan para petani terhadap informasi yang disampaikan kepada mereka sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengemas dan menyampaikan informasi. Informasi harus menyentuh dan diharapkan mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini,

selain kemasan pesan yang tepat dan benar, sosok sang penyuluhpun dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelompok. Untuk itu, penyuluh kehutanan harus dapat menampilkan diri sebagai sosok yang dapat dipercaya (*trust*) dan mampu menarik rasa suka masyarakat.

b. **Tahap Penjajagan (*Experimenting*)**, merupakan usaha mencari cara membangun keinginan para petani dengan melakukan pencarian terhadap kemiripan-kemiripan kebutuhan diantara para petani. Pada tahap ini, penyuluh kehutanan diharapkan mampu menggali aspirasi masyarakat, mampu melihat hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, mampu mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat terbentuknya suatu kelompok. Dengan memperoleh informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka akan diketahui apakah masyarakat merasa butuh atau tidak akan adanya kelompok. Apabila masyarakat belum merasa butuh maka perlu dilakukan kembali penggugahan kesadaran atau kembali ke tahap awal (*Initiating*). Yang harus diperhatikan dan diusahakan oleh para penyuluh kehutanan bahwa keberadaan kelompok harus merupakan keinginan dan kebutuhan yang datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan akan dikelola oleh masyarakat tani itu sendiri, jadi bukan merupakan paksaan atau pesanan pemerintah (*top down*). Pada tahap ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang sistem sosial masyarakat, termasuk untuk memperkirakan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari terbentuknya kelompok.

c. **Tahap Penggiatan (*Intensifying*)**, ditandai dengan adanya kecenderungan perubahan sikap. Artinya sebagian besar masyarakat tani merasakan sangat perlu dan setuju adanya wadah dalam mencapai tujuan mereka, maka penyuluh kehutanan perlu secara terus menerus melaksanakan pendekatan kepada mereka melalui pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan secara formal maupun informal, seperti berkunjung dari rumah ke rumah, mengadakan pertemuan di Balai Pertemuan Desa, ataupun kegiatan lainnya yang dapat memperkokoh minat serta keinginan masyarakat tani dalam membentuk wadah kelompok. Pada tahap ini, informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan para petani diusahakan harus selalu tersedia. Dapat juga dengan melakukan kegiatan studi banding yaitu dengan mengajak beberapa petani yang menjadi tokoh masyarakat mengadakan kunjungan ke tempat yang memiliki kelompok tani maju yang dapat dijadikan contoh.

d. **Tahap Pengintegrasian (*Integrating*)**, setelah semakin terlihat adanya perubahan yang kuat pada sikap dan perilaku petani, penyuluh kehutanan kiranya perlu memfasilitasi masyarakat tani untuk mengadakan pertemuan-pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan ini penting dalam rangka membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pentingnya kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi. Diharapkan elemen-elemen yang terlibat dalam pertemuan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, Penyuluh kehutanan, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan bila perlu melibatkan pula LSM-LSM, dunia usaha dan pihak lainnya yang terkait. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam

dialog tersebut maka akan semakin banyak masukan dari berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya dan memperkuat kelancaran dan kesuksesan program kelompok apabila nantinya terbentuk, serta mempermudah pembinaan kelompok di masa mendatang.

**e. Tahap Pengikatan(*Bonding*).** Dari pertemuan-pertemuan formal tadi maka dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk suatu kelompok tani. Pada tahap ini, para petani mengikrarkan kesepakatan dalam sebuah kebersamaan atau kelompok kerja. Setelah kelompok terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan penyusunan struktur organisasi kelompok, program kerja, penentuan sekretariat kelompok, sumber dana kegiatan dan lain sebagainya demi kelancaran aktivitas kelompok dan kelangsungan hidup kelompok.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah membentuk kelembagaan KPHP Model Dolago Tanggunung dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2012 Tanggal 27 Nopember 2012. Percepatan pembangunan KPHP Model Dolago Tanggunung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan kawasan ini merupakan daerah rawan bencana banjir.. Namun sampai saat ini pengelolaanya belum berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Pengelolaan hutan oleh KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan

hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi. Dalam hal ini seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Oleh sebab itu kesiapan KPH sangat penting dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan penelitian ini kesiapan KPH akan di ukur dari beberapa kriteria dan indikator, seperti: kesiapan penetapan wilayah contohnya SK Menteri, tata batas hutan, inventarisasi potensi hutan, pembagian blok atau zona, penataan batas blok, pemetaan wilayah pengembangan HKm, kesiapan kelembagaan dalam hal ini yang di maksud adalah organisasi KPH dan sarana prasarana contohnya penyiapan SDM pengelola hutan, struktur organisasi KPH, pembagian kerja, peta kerja pengelola KPH, bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan operasional, sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan dan kesiapan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta kesiapan masyarakat itu sendiri baik dari pemahaman, keterlibatan sampai pada kelembagaan masyarakat itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Ridwan (2006) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, sedangkan menurut Hidayat (2010) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata, Setiyosari (2010). Penelitian ini juga merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Kasiran (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya dengan tidak di rubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moelong (2007) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif kualitatif juga menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi di Desa Bakubakulu selama 3 bulan mulai tanggal 02 September 2016 sampai dengan bulan 02 November 2016.

### **3.3 Populasi**

Populasi dalam hal ini adalah Kelompok Tani yang terlampir pada SK Menteri yang berjumlah 55 orang.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Adapun variable yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum adalah kesiapan KPH serta kesiapan masyarakat dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial. Namun dalam variable tersebut di jabarkan lebih jelas lagi melalui indikator dan kriteria penelitian ini. Indikator adalahq sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan tertentu. Agar dapat diamati, diverifikasi, dan dinilai secara obyektif maka setiap indikator dapat diturunkan menjadi elemen-elemen kualitas penyusunnya sedangkan kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sebuah kriteria dapat diturunkan menjadi satu atau lebih indikator yang mempunyai hubungan dan kaitan langsung yang kuat. Berikut kriteria dan indikator pada penelitian ini

#### A. Kesiapan KPH:

Kriteria	Indikator	Parameter
1. Wilayah	a. Tata Batas Kawasan	
	b. Inventarisasi Hutan	- Status, Penggunaan dan Penutupan Lahan - Tanah, Topografi dan kelerengan - Iklim

	<p>c. Pembagian Blok</p> <p>d. Pembagian Petak</p> <p>e. Pemetaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hidrologi</li> <li>- SDM dan Demografi</li> <li>- Jenis, Potensi, Sebaran Flora</li> <li>- Jenis Populasi dan Habitat Fauna</li> <li>- Kondisi Sosial Ekonomi</li> <li>- SK menteri Penetapan Areal Kerja HKm</li> <li>- Karakteristik Biofisik Lapangan</li> <li>- Potensi SDA</li> <li>- Keberadaan Hak atau Ijin Usaha dan Pemanfaatan.</li> <li>- SK Menteri Penetapan Areal Kkerja Hkm</li> <li>- Produktivitas dan Potensi Areal</li> <li>- Kawasan Lindung: Gambut, Resapan air,</li> </ul>
--	---	---



		<p>Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejauhmana masyarakat lokal ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa tersebut.</li> <li>- Hak akses masyarakat</li> </ul>
--	--	---

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas: indikator dan kriteria yang dimaksud seperti kesiapan KPH Dolago Tanggunung meliputi penetapan wilayah, kelembagaan, rencana, serta pemberdayaan masyarakat dan kesiapan masyarakat meliputi persepsi dan sikap serta kelembagaan kelompok tani tersebut. Data diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, serta hasil qusioner dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini melibatkan KPH Dolago Tanggunung, serta hasil kajian pustaka. Data sekunder meliputi gambaran umum lokasi (kondisi demografi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat), serta data-data lainnya yang dapat menunjang penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pembagian qusioner dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Selain menggunakan qusioner, untuk meningkatkan keragaman data, maka informan yang dipilih dibatasi dengan kriteria: (a) Informan adalah kelompok tani, (b) Informan memiliki kawasan lahan yang terletak disekitar daerah program Perhutanan Sosial. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan menggunakan jenis pemilihan secara sengaja atau *purposive sampling* pada pembagian qusioner.

### **3.6 Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang umum digunakan pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif seperti alat tulis menulis, bahan untuk wawancara (Qusioner) dan alat dokumentasi.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Setelah semua data diolah, data kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan analisisnya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan data dianalisa melalui alur serta dilakukan bersamaan dengan jalannya penelitian.

Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan (Moleong, 2005), yaitu :

#### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan

penelitian, lalu data dikelompokkan sesuai masalah sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di evaluasi/diverifikasi.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data dikumpulkan maka data disajikan. Penyajian data dibuat untuk memberikan deskripsi mengenai data yang telah dikumpulkan dan memudahkan untuk pengambilan keputusan. *Display data* atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk eksnaratif.

## 3. Verifikasi

Pada penelitian Kualitatif, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Selain itu analisis data yang digunakan adalah dengan penskalaan 1-3-5 (Modifikasi Skala Likert) penelitian deskriptif yang biasa juga disebut penelitian taksonomik. Dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti. Begitupun yang dikatakan oleh (Ridwan dan Kuncoro 2006), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Pada penskalaan metode ini, setiap informan akan diminta untuk menyatakan jawabannya terhadap pernyataan-pernyataan didalam qusioner dalam tiga kategori jawaban, yaitu sebagai berikut:

### a. Tidak siap

b. Kurang siap

c. Siap

Contoh:

Dalam pengambilan data angket (kuisioner), instrument dibagikan kepada seluruh anggota KT. Kemudian direkapitulasi:

Dengan 3 (tiga) kategori jawaban:

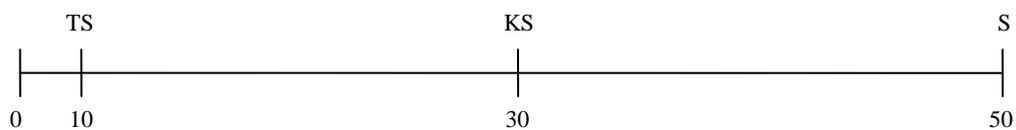
Tidak Siap : 1

Kurang Siap : 3

Siap : 5

$X = \text{Skor Tertinggi} = 10 \times 5 = 50$  (SS)

$Y = \text{Skor terendah} = 10 \times 1 = 10$  (TS)



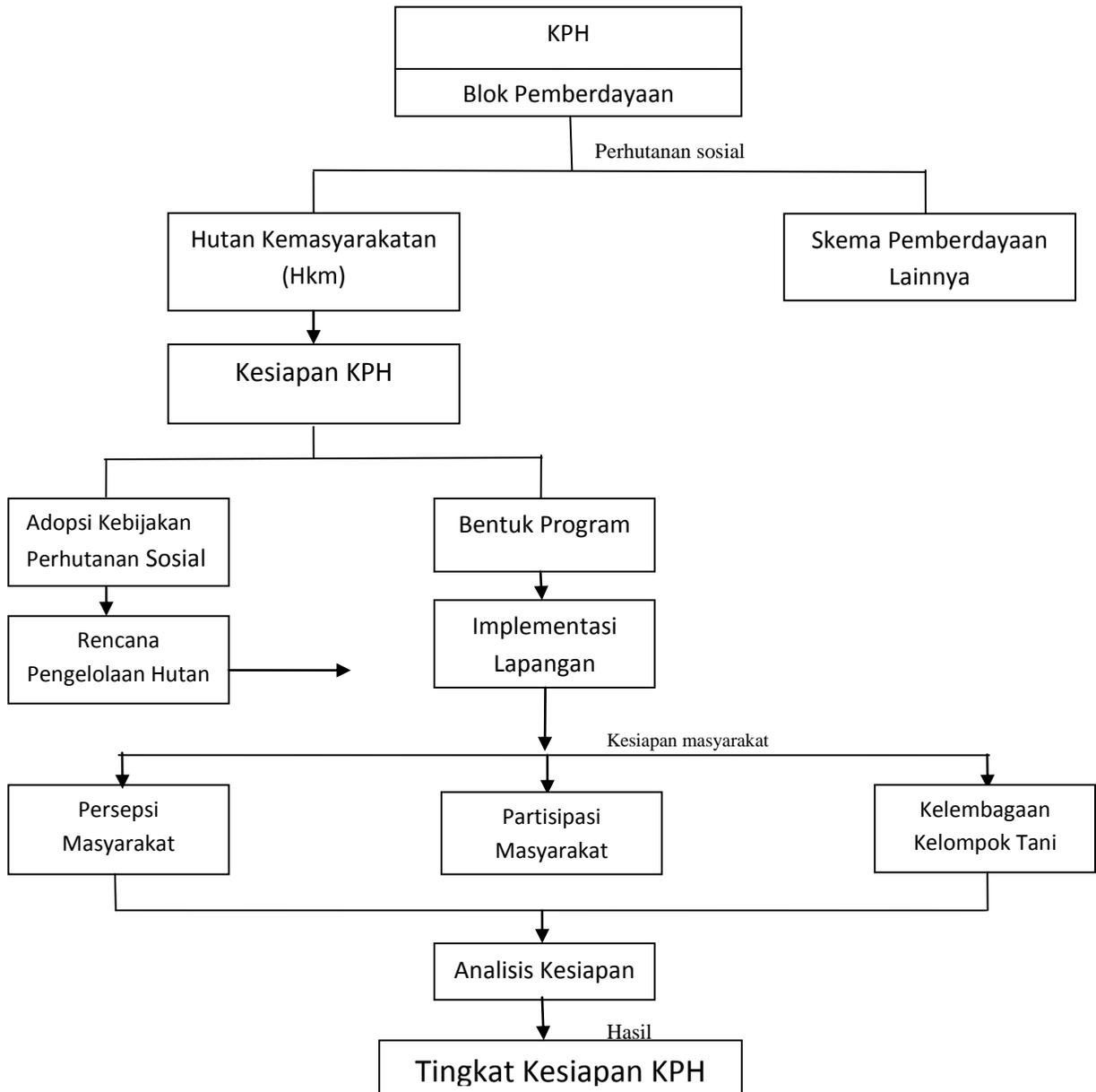
Jadi berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat di interpretasikan kedalam kriteria skor rendah (0-33), sedang (34-66), tinggi (67-100) dalam presentase (%), sesuai jawaban masing-masing responden.

$\text{Index \%} = \text{Total Skor} / X \times 100\%$

Selain itu, ditentukan skor atau bobot nilai dari masing-masing jawaban sesuai dengan kategori jawaban yang *favourable* atau *non-favourable*.



tingkat kesiapan KPH dan kesiapan masyarakat. Keseluruhan tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa**

Desa Bakubakulu terbentuk pada tanggal 9 November tahun 1927, yang penduduknya mayoritas dihuni oleh suku Kaili yang berbahasa Ija, yang berasal dari Silonga dan bahasa Tayang awalnya berasal dari Kampung Bangga, Ruva, dan Bolavanga, yang sekarang berada diruang lingkup RT 005 Dusun 2 Desa Bakubakulu. Kata 'Bakubakulu' terdiri dari dua suku kata yakni Baku yang berarti bekal, dan Bakulu adalah nama orang yang pertama kali menghuni desa ini, sehingga sampai saat ini masyarakat Desa Bakubakulu meyakini bahwa Bakulu adalah seorang tokoh yang menanam pohon Maku (Jambu Air) yang kemudian dijadikan nama desa menjadi 'Makubakulu' kemudian berubah menjadi 'Bakubakulu' sampai sekarang.

##### **4.1.1 Luas, Batas Wilayah dan Jumlah Penduduk**

Luas dan Batas Wilayah Desa Bakubakulu adalah desa yang berada di sekitar hutan dengan luas wilayah 3438,45Ha dengan bentangan wilayah yang berbukit-bukit dengan curah hujan 4470 mm dengan suhu rata-rata 30-34 derajat celcius dengan ketinggian 660m dari permukaan laut, dengan batas wilayah:-

Sebelah Utara berbatas: dengan kawasan Hutan-

Sebelah Timur berbatas: dengan Desa Bobo /Bunga-

Sebelah selatan berbatas: dengan hutan penyanggah Taman Nasional Lore

Lindu-

Sebelah barat berbatas: dengan Desa Sigimpu

Keadaan jumlah penduduk Desa Bakubakulu sesuai dengan hasil permuktahiran data pada buku profil desa sejumlah 1328 jiwa dengan jumlah KK 372, laki-laki berjumlah 745 orang dan perempuan berjumlah 583 orang dengan kepadatan penduduk 7orang/km.

#### **4.1.2 Letak dan Luas Wilayah KPH**

Secara geografis, KPHP Model Dolago Tanggunung berada pada posisi 119° 54' 13,80" s.d 120° 33' 40,03" BT dan 0° 42' 46,15" s.d 1° 14' 12,67" LS. Secara administratif pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, berada dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.755/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dolago Tanggunung (unit VI dan unit IX), yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas areal ± 144.349 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung dengan luas ± 67.794 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 57.548 Ha, dan Hutan Produksi seluas ± 19.008 Ha. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.635/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 8.409 ha dan Penunjukan Bukan Kawasan

Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 91 ha di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga luas kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan uraian di atas dan peta hasil tata hutan tahun 2013 KPHP Model Dolago Tanggunung memiliki kawasan seluas ± 129.467 ha (sesuai SK. Menhut Nomor 635/Kpts-II/2013). Adapun rincian masing-masing fungsi kawasan dan perbandingannya dengan luas kawasan fungsi hutan menurut Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Dolago Tanggunung II-2 SK. Menhut Nomor 755/Kpts-II/2012 seperti pada Tabel 1. Perhitungan luas areal tersebut telah dikeluarkan areal enklave/APL (Desa Lemban Tongoa dan Manggalapi) dari wilayah KPH.

**Tabel 1 Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung**

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha) (SK. 635/2013)	Luas (Ha) (SK. 755/2012)
1.	Hutan Lindung	58.418	67.794
2.	Hutan Produksi (HPT)	54.125	57.548
3.	Hutan Produksi (HP)	16.924	19.008
<b>Jumlah</b>		<b>129.467</b>	<b>144.349</b>

#### 4.1.3 Aksesibilitas Kawasan

Lokasi KPHP Model Dolago Tanggunung di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berada pada limabelas wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Nokilalaki, Palolo, Sigi Biromaru di Kabupaten Sigi; Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi, Parigi Barat, Parigi Utara

dan Parigi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong; Kecamatan Mantikulore, Palu Utara dan Tavaili di Kota Palu; Kecamatan Tana Ntovea di Kabupaten Donggala. Kelimabelas kecamatan tersebut memiliki aksesibilitas wilayah yang cukup memadai berupa jalan aspal dan jalan sirtu. Dengan demikian keterjangkauan wilayah KPH ini cukup mudah dijangkau hingga pada batas batas luar kawasan hutan. Dalam wilayah KPH saat ini terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dijangkau baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, seperti enclave Lemban Tongoa di Kecamatan Palolo, perkampungan Manggalapi di wilayah Kecamatan Sausu. Di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung ini merupakan areal eks. HPH PT. Radar Utama Timber dan HPH PT. Kebun Sari, sehingga di dalam wilayah KPH ini terdapat beberapa bekas jaringan jalan HPH. Namun demikian umumnya jalan-jalan eks. HPH tersebut saat ini telah rusak dan ditumbuhi semak belukar sehingga tidak dapat lagi dilewati kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis citra Landsat 7 ETM Band 543 perekaman tahun 2011-2012 terdapat beberapa titik lokasi dalam wilayah KPH yang telah lama menjadi lokasi aktifitas perambahan hutan berupa pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan pertanian lahan kering seperti di wilayah Kecamatan Sausu hingga Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Palolo dan Sigi Biromaru di Kabupaten Sigi, Kecamatan Mantikulore, Palu Utara dan Tavaili Kota Palu, Kecamatan Tana Ntovea Kabupaten Donggala.

#### **4.1.4 Sejarah Wilayah KPH**

KPHP Model Dolago Tanggunung yang merupakan gabungan KPHP Unit IX dan KPHL Unit VI, terletak di wilayah Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.755/MENHUT-II/2012 Tanggal 26 Desember 2012 seluas  $\pm 144.349$  Ha dengan rincian Hutan Lindung seluas  $\pm 67.794$  Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 57.548$  Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 19.008$  Ha. Berdasarkan hasil revisi tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah luas wilayah KPHP Dolago Tanggunung seluas  $\pm 129.467$  Ha dengan rincian Hutan Lindung seluas  $\pm 58.418$  Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas  $\pm 54.125$  Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 16.924$  Ha.

Berdasarkan sejarah pengelolaan hutan, wilayah KPHL Unit VI dan KPHP Unit IX pernah dikelola oleh HPH PT. Radar Utama Timber dan HPH PT. Kebun Sari. Di Wilayah KPHP Unit IX tepatnya di kawasan Hutan Produksi (HP) Desa Sausu Piore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong pernah dibangun hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 1.000 Ha pada tahun 2000/2001. Selanjutnya di wilayah KPHL Unit VI terdapat Ijin Kawasan Hutan yang diperuntukkan untuk tujuan khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu tepatnya di Desa Kapiroe, Desa Petimbe, Desa Rejeki, Desa Berdikari, Desa Bahagia, Desa Air Panas, Desa Menawa, Desa Motow dan Desa Banpres Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi seluas  $\pm 5.080$  ha. Di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung terdapat pula

ijin IUPHHK-HTI PT. Coltan Agro dengan areal seluas  $\pm 5.790,93$  ha. Percepatan pembangunan KPHP Model Dolago Tanggunung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan kawasan ini merupakan daerah rawan bencana banjir. Karena itu kawasannya perlu dikelola dan dimanfaatkan sesuai kaidah-kaidah kelola hutan yang baik dan benar sesuai kondisinya serta taat pada peraturan perundang-undangan.

Penetapan Peraturan Gubernur tentang kelembagaan KPH dalam bentuk UPT KPHP Model Dolago Tanggunung menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung percepatan pembangunan unit KPH sangat positif. Sebelum pembentukan kelembagaan KPHP Model Dolago Tanggunung sesuai Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2012, berbagai kegiatan pernah dilakukan sbb.: (a) penyusunan naskah akademik KPH, dan (b) sosialisasi rencana pembangunan KPH dan hingga saat ini belum memiliki dokumen rencana pengelolaan.

## **4.2 Hasil**

### **Kesiapan KPH**

Kesiapan KPH di nilai sangat penting dan berpengaruh dalam penerapan blok pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam

rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan salah satunya melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk memberikan akses (Arifin, 2006) dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Dwiprabowo dkk., 2013).

Oleh sebab itu kesiapan KPH mengacu pada UU No.41/1999 tentang Perencanaan Hutan yang di sebutkan pada Pasal 21a tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 22 UU 41/1999 dan PP 6/2007 pasal 12 tentang Tata Hutan, indikator yang dimaksud adalah Tata Batas Kawasan, Inventarisasi Hutan, Pembagian Blok, Pembagian Petak dan Pemetaan yang merujuk pada Permenhut No. 6 tahun 2010 Pasal 4 tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek. Berikut ini hasil penelitian pada kesiapan KPH Dolago Tanggunung.

#### **4.2.1 Tata Batas Kawasan**

Tata hutan pada KPH Dolago Tanggunung dilakukan berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi hutan. Tata hutan ini meliputi kegiatan pembagian blok dan pemetaan hasil pembagian blok tersebut berdasarkan karakteristik geofisik hutan, potensi sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Pada dasarnya pelaksanaan penataan hutan pada wilayah KPH bisa dikerjakan sendiri oleh organisasi KPH maupun difasilitasi oleh BPKH. Namun, pelaksanaan

tata hutan pada KPH Dolago Tanggunung kali ini akan dilakukan melalui fasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.

Kerangka kerja penyusunan tata hutan mengacu pada UU No 41 tahun 1999 Pasal 7 tentang pembentukan wilayah pengelolaan yang kemudian diatur dalam pasal 21.a tentang Tata hutan dan rencana pengelolaan. Pada program pemberdayaan masyarakat di desa Bakubakulu ini, KPH Dolago Tanggunung sudah melakukan tata batas kawasan hutan yang akan dikelola oleh masyarakat setempat. Areal kerja Hm seluas 590 Hektar dan sudah dilakukan tata batas keliling.

#### **4.2.2 Inventarisasi Hutan**

Pengertian dan Definisi Inventarisasi hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.

Kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari:

1. Inventarisasi hutan tingkat nasional
2. Inventarisasi hutan tingkat wilayah
3. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan
4. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan
  - a. Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional
    1. Menteri menetapkan kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan
    2. Menteri menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat nasional

3. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya
4. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun
5. Menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.

b. Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (Propinsi)

1. Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan
2. Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat propinsi dengan mengacu pada pedoman inventarisasi hutan yang ada
3. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat propinsi dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah propinsi dan dengan mengacu kepada hasil inventarisasi hutan tingkat nasional. Apabila hasil inventarisasi hutan tingkat nasional belum tersedia, Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumberdaya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
4. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

c. Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (Kabupaten/Kota)

1. Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan yang disusun berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri.
2. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan diseluruh wilayah kabupaten/ kota dan dengan mengacu kepada hasil inventarisasi tingkat propinsi. Apabila hasil inventarisasi hutan tingkat propinsi belum tersedia, Bupati/ Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumberdaya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
3. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

#### d. Inventarisasi Hutan Tingkat DAS

1. Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur sebagai berikut :
  - Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas propinsi diselenggarakan oleh Menteri
  - Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur.
  - Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.
1. Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan. Bagi DAS yang wilayahnya

meliputi lintas propinsi mengacu pada hasil inventarisasi tingkat nasional, sedangkan DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota mengacu pada pedoman/ketetapan Gubernur tentang pedoman inventarisasi hutan serta hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat propinsi.

2. Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/ kota dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman/ketetapan Gubernur tentang pedoman inventarisasi hutan serta hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah.
3. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

e. Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

1. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan hutan yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Inventarisasi ini dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun sedangkan inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa KPH Dolago Tanggunung sudah melakukan kegiatan inventarisasi potensi, sebagai berikut:

1. Iklim

Wilayah KPH Model Dolago Tanggunung dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis

Peta Curah Hujan RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah KPH Dolago Tanngunung berkisar 1.000-2.400 mm/tahun. Curah hujan dominan berkisar 1.600-1.800 mm/tahun.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2011, Kabupaten Parigi Moutong memiliki curah hujan bulanan berkisar 38-331 mm. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Juni dan November dan curah hujan terendah pada bulan Desember hingga Januari.

Dari data Laboratorium Pertanian Dolago periode tahun 2007-2008, curah hujan mencapai 1.990-2.382 mm/tahun dengan curah hujan bulanan mencapai 81-221 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Juni dan curah hujan terendah pada bulan Februari. Jumlah hari hujan 152-159 hh. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa tipe iklim di wilayah ini adalah tipe A (Schmidt-Ferguson) dengan nilai  $Q = 0$  %. Rata-rata bulan basah sebanyak 11 bulan dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm bulan<sup>-1</sup>, dan rata-rata bulan keringnya sebanyak 0 bulan dengan jumlah curah hujan bulanan kurang dari 60 mm bulan<sup>-1</sup>. Intensitas hujan 12,52.

Selanjutnya dari data Laboratorium Pertanian Siniu periode tahun 2007-2008, curah hujan mencapai 116-488 mm/tahun dengan curah hujan bulanan mencapai 1-88 mm. Bulan dengan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan April dan curah hujan terendah pada bulan Mei. Jumlah hari hujan 118-149 hh. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa tipe iklim di wilayah ini adalah tipe A dengan jumlah bulan basah sebanyak 0 bulan dengan jumlah

curah hujan bulanan lebih dari 100 mm bulan-1, dan rata-rata bulan keringnya sebanyak 9 bulan dengan jumlah curah hujan bulanan kurang dari 60 mm bulan-1. Intensitas hujan 4,14.

Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Pengamat Cauaca di Desa Olaya Kecamatan Parigi tahun 20012-2006 diketahui bahwa rata-rata suhu udara maksimum adalah  $30.40^{\circ}\text{C}$  sedangkan rata-rata adalah 87,53%, tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 67%.

Berdasarkan data Stasiun SPAS Miu BPDAS Palu Poso Tahun 2005-2008 diketahui rata-rata curah hujan bulan tertinggi jatuh pada Bulan April (335.93mm/13,75 hh) dan terendah jatuh pada Bulan Juli (53,50 mm/10 hh). Rata-rata curah hujan tahunan selama periode tahun 2005-2008 mencapai 1.657 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,25 hh. Dari data sebarab bulanan curah hujan diketahui sebanyak 6 bulan basah dan 1 bulan keing, dengan diketahui demikian nilai  $Q = 16,67\%$ . Berdasarkan kalsifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson nilai tersebut berada pada kelas tipe B.

Berdasarkan data curah hujan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, curah hujan rata-rata tahunan tertinggi yang tercatat untuk wilayah DAS Palu dan sekitarnya di Kota Palu periode tahun 2005-2010 adalah sebesar 88,43 mm yang terjadi pada bulan Juli, dan terendah sebesar 35,83 mm terjadi pada bulan Februari. Curah hujan tahunan sebanyak terjadi pada tahun 2007 sebesar 948,90 mm, sedangkan curah

hujan tahunan terendah sebesar 562,80 mm terjadi pada tahun 2009. Adapun jumlah curah hujan rata-rata tahunan sebesar 774,30 mm/tahun. berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Fegurson, termasuk tipe iklim D. Hasil pencatatan suhu di Stasiun Meteorologi Mutiara Palu pada 2005-2010, menunjukkan bahwa suhu udara berkisar antara 25,70°C- 27,10°C, dengan rata-rata suhu maksimum adalah 26,56°C. Kelembaban udara berkisar antara 77%-83%, dengan kelembaban udara rata-rata adalah 79%. Semetara itu kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2,6-4,5 knots.

Jenis batuan Tpkg adalah jenis yang mendominasi wilayah KPH di wilayah Kecamatan Parigi Selatan hingga Kecamatan Torue. Jenis batuan Km mendominasi wilayah KPH bagian utara yaitu mulai dari Kecamatan Parigi Barat hingga Parigi Utara. Jenis batuan Kls hanya dijumpai di wilayah KPH di wilayah hulu Sungai Sausu dan Tambarana. Jenis batuan gr dijumpai di wilayah KPH Kecamatan Torue desa Tindaki. Untuk jenis Qal dijumpai di wilayah KPH Desa Sausu Peore hingga Malakosa.

c. Sistem Lahan

Berdasarkan peta sistem lahan, wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung diketahui karakteristik tipe lahan dan pola penyebarannya seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2 Sistem Lahan**

No	Simbol	Nama	Sistem Lahan	Tipe Lahan	Land Coverage
1	2	3	4	5	6
1	BPD	Bukit	Plato & Sistem	Punggung	Dominan dari

---

		Pandang	Pegunungan	gunung metamorfik terorientasi yang terjal	Parigi Selatan hingga Parigi Utara dan Tana Ntovea
2	MPT	Maput	Perbukitan	Punggung bukit sedimen asimetrik terorientasi	Sedikit dijumpai setempat di wilayah HL Kec. Palolo
3	PDH	Pandreh	Plato & Sistem Pegunungan	Punggung bukit sedimen asimetrik yang tertoreh melebar	Mendominasi wilayah KPH di Desa Sausu Peore-Malakosa
4	TWI	Telawi	Plato & Sistem Pegunungan	Punggung-punggung granit terorientasi terjal	Dominan dari Parigi Selatan hingga Sausu
5.	SMA	Salo Marana	Perbukitan	Punggung bukit sedimen asimetrik	Mantikolore hingga Tavaili

---

## 2. Geomorfologi Lahan

Secara fisiografis, wilayah KPHP Dolago Tanggunung terbagi atas satuan morfologi yaitu dataran lembah sungai, perbukitan dan pegunungan. Dari peta RTkRHL DAS BPDAS Palu Poso tahun 2009 diketahui bahwa di wilayah KPH ini terdapat tiga jenis morfologi hulu. Morfologi hulu mendominasi kawasan perbukitan dan pegunungan, diseluruh wilayah KPH, morfologi hilir terhampar tidak luas di wilayah lembah dan dataran. Adapun morfologi tengah dapat dijumpai menyebar pada lahan-lahan berlereng landai hingga agak curam.

### a. Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi ini menempati daerah sebelah selatan wilayah KPH, dengan arah penyebaran melebar di bagian timur wilayah Sausu. Satuan morfologi ini terbentuk disebabkan adanya struktur geologi yang berkembang di daerah tersebut graben, sehingga batuan yang lebih tua hancur dan berakumulasi di daerah dataran lembah sungai. Satuan morfologi ini di wilayah KPH mempunyai ketinggian topografi berkisar antara 100-200 m di atas permukaan laut, disusun oleh batuan endapan aluvium yang terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal yang merupakan hasil rombakan dari daerah perbukitan sekitarnya.

### b. Satuan Morfologi Daerah Perbukitan dan Pegunungan

Satuan ini penyebarannya menempati daerah paling luas dalam wilayah KPH yang memanjang dari batas utara KPH (Nupabomba) hingga di bagian selatan KPH di wilayah Lembah Tongoa dan sekitarnya. Satuan ini memiliki ketinggian topografi

antara 500-1.888 m dpl, dengan kemiringan lereng landai hingga terjal. Morfologi daerah perbukitan ini disusun oleh berbagai jenis batuan yaitu berupa endapan Molasa Sarasin (konglomerat, batupasir, batulempung, dan batulanau) endapan gunung api (tufa, lava dan breksi gunung api), batuan metamorf dan sedimen (perselingan batubasak, filit, greywacke, argilit, batugamping, lanau dengan sisipan konglomerat, seksis, mika, genes, kuarsa, granit, serta granodiorit dengan penyebarannya cukup luas di wilayah ini.

c. Aliran Sungai

Sungai-sungai yang berada di wilayah KPH ini dengan sungai utamanya atau dianggap sungai besar adalah Sungai Sopus, Sungai Wuno, Sungai Paneki di Kabupaten Sigi; Sungai Sausu, Sungai Torue, Sungai Tindaki, Sungai Dolago, Sungai Baliara, Sungai Pelawa, Sungai Pelawa, Sungai Pangi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong; Sungai Kawatuna, Sungai Poboya, Sungai Taipa, Sungai Tavaili di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Sungai-sungai di wilayah Kabupaten Parigi Moutong semuanya bermuara di Teluk Tomini, sedangkan sungai-sungai di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala bermuara di Teluk Palu. Sungai-sungai yang bermuara di Teluk Palu umumnya timbul akibat adanya struktur geologi yang berkembang di daerah ini yang dikenal dengan struktur graben Palu yang merupakan struktur utama. Sungai tersebut pada umumnya merupakan sungai abadi atau berair di sepanjang musim, terutama dalam wilayah KPH. Semua anak cabang yang mengalir dari daerah perbukitan akan berkumpul dan bersatu di bagian tengah yaitu sungai-sungai utama.

Sungai ini mengalir dari bagian selatan menuju ke utara yaitu ke arah pantai atau bermuara ke Teluk Palu.

Pola pengaliran sungai merupakan suatu pola pengaliran dendritik (mendaun). Pola pengaliran sungai dendritik (mendaun), penyebarannya menempati daerah perbukitan/pegunungan dan dataran tinggi seperti yang dijumpai di bagian timur, selatan dan setempat di sebelah barat dengan bantuan penyusunnya bersifat homogeny yang pada umumnya terdiri atas granit yang kekerasan batumannya relatif sama, stadium erosi pada daerah yang berpola aliran sungai ini relatif masih muda, hal ini dapat ditunjukkan oleh bentuk lembahnya masih sempit dan dalam atau menyerupai huruf V.

### 3. Topografi dan Lereng

Topografi di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung disominasi pegunungan dan perbukitan. Adapun topografi dataran, berombak dan bergelombang hanya dijumpai pada wilayah-wilayah sempit diantara perbukitan dan pegunungan. Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama pada bagian tengah yang memanjang dari timur ke barat yang berbatasan dengan kawasan pertanian dan pemukiman di kawasan APL baik di wilayah pesisir Kabupaten Parigi Moutong maupun di wilayah Lembah Palu dan sekitarnya. Sedangkan daerah dataran rendah dengan cakupan cukup luas ditemukan pada bagian timur wilayah KPH yaitu di wilayah Kecamatan Sausu hingga Kecamatan Balinggi. Kondisi topografi pada wilayah KPHP Model Dolago

Tanggunung bervariasi yang terdiri dari beberapa kelas lereng dengan sebaran sebagai berikut: 16,77% dari luas total kawasan berlereng datar (0-8%), 38,33% dari luas total kawasan berlereng landai (8-15%), 35,80% dari luas total kawasan berlereng agak curam (15-25%), 8,59% dari luas total kawasan berlereng curam (24-05%) dan sisanya sebanyak 0,50% dari luas total kawasan berlereng sangat curam (>40%), secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3 Kondisi Topografi**

Kelas Lereng	Slope	Deskripsi	Luas (Ha)	Presentase (%)
I	0-8%	Datar	21.717,57	16,77
II	8%-15%	Landai	49.630,45	38,33
III	15%-25%	Agak Curam	46.346,58	35,80
IV	25%-40%	Curam	11.120,18	8,59
V	>40%	Sangat Curam	652,43	0,50
Jumlah			129.467,20	100,00

Sumber; Pengelolahan data BPKH Wilayah Palu, Tahun 2013.

#### 4. Hidrologi dan DAS

Di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung empat DAS prioritas I yaitu DAS Palu, DAS Sausu, DAS Tindaki dan DAS Baliara. Sedangkan DAS lainnya termasuk dalam prioritas II adalah DAS Tavaili, DAS Toboli, DAS Taipa, DAS Poboya, DAS Korontua, DAS Pelawa, DAS Olaya, DAS Dolago, DAS Astina, DAS Tolai, DAS Torue, DAS Waytua. DAS prioritas III adalah DAS Bonu I, DAS Bonu

II, DAS Pabengko dan DAS Maleali. Air sungai di wilayah KPH ini sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian. Hamparan lahan sawah yang luas terdapat di wilayah DAS Sausu, DAS Tolai, DAS Torue, DAS Astina, DAS Tindaki, DAS Korontua dan DAS Olaya di Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan di wilayah Kabupateng Sigi, sungai-sungai utama penyuplai air irigasi sawah adalah Sub DAS Sopi DAS Palu, DAS Wuno dan DAS Paneki. Sungai-sungai penyumbang banjir dan sedimentasi terbesar di wilayah KPH ini adalah Sungai Sausu, Sungai Torue, Sungai Tindaki, Sungai Dolago, Sungai Olaya, Sungai Baliara, Sungai Pelawa di Kabupaten Parigi Moutong dan Sungai Sopi di Kabupaten Sigi. Selanjutnya di wilayah Kota Palu sungai-sungai penyumbang banjir adalah Sungai Poboya, Sungai Wintu, dan Sungai Tavaili.

#### 5. Penutupan Vegetasi/Lahan

Kondisi penutupan lahan/vegetasi di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung dimuraikan sbb: Tutupan lahan berupa hutan lahan kering primer (Hp) seluas 101.031,00 Ha; hutan lahan kering sekunder (Hs) seluas 18.831,96 Ha; seluas 538,79 Ha pertanian lahan kering (Pt); seluas 5.959,02 Ha pertanian lahan kering bercampur semak (Pc); seluas 2,48 Ha sawah (Sw); seluas 3.062,06 Ha semak belukar (S/B); seluas 443,46 Ha tanah terbuka (T); seluas 41,73 Ha pertambangan dan seluas 0,16 Ha berupa tubuh air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Kondisi Penutupan Lahan/Vegetasi**

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase %
----	-----------------------	-----------	--------------

1	Hutan Lahan Kering Primer	101.031,00	78,04
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	18.831,96	14,55
3	Pertanian Lahan Kering	538,79	0,42
4	Pertanian Lahan Kering Campur	5.959,02	4,60
5	Pertambangan	41,73	0,03
6	Sawah	2,48	0,00
7	Semak Belukar	3.062,06	2,37
8	Tubuh Air	0,16	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>129.467,20</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu, tahun 2013

#### 6. Potensi Tegakan

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, KPHP Model Dolago Tanggunung memiliki potensi tegakan rata-rata adalah 93,40 m<sup>3</sup>/Ha pada kelas hutan lahan kering primer, 62,82 m<sup>3</sup>/Ha pada kelas hutan lahan kering sekunder dan 7,59 m<sup>3</sup>/Ha pada kelas pertanian lahan kering. Dalam proses tata hutan ini diasumsikan bahwa ada tiga kelas potensi tegakan, yaitu terdiri atas tinggi (>150 m<sup>3</sup>) pada hutan lahan kering primer, sedang (50-150<sup>3</sup>) pada hutan lahan kering sekunder, dan rendah (<50 m<sup>3</sup>) pada kelas tutupan non-hutan.

#### 7. Potensi Kayu/Non-Kayu

KPHP Model Dolago Tanggunung merupakan wilayah KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang cukup tinggi. Di wilayah KPH ini terdapat hutan pegunungan/hutan dataran tinggi dan dataran rendah yang kaya jenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu, baik jenis komersial maupun non-komersial. Jenis-jenis flora yang cukup dikenal masyarakat bernilai komersil tinggi di pasar Internasional maupun domestik, khususnya dari jenis kayu adalah Kayu Meranti (*Shorea (spp)*), Palapi (*Herriteria sp*), Nnyatoh (*Palaquiums spp*), Rau (*Dracontamelon mangiferum*), Bintangur (*Calophyllum soulatri*), Eboni (*Diospyros celebica*), Maraula (*Diospyros macrophylla*), Agatis/Damar (*Agathis spp*), Matoa (*Pometia pinnata*), Dao (*Dracontamelon dao*), Mangga hutan (*Mangifera foetida*), Binuang (*Octomeles sumatrana*), dll. Selanjutnya dari jenis flora berupa jenis non-kayu adalah Rotan (*Calamus spp*), Bambu (*Bambusa spp*), Aren (*Arenga pinnata*) dan jenis palma lainnya. Dari jenis flora tersebut beberapa jenis yang dikategorikan sebagai jenis yang dikategorikan sebagai jenis tanaman multiguna seperti Agatis (penghasil kayu dan getah damar), Durian (penghasil kayu dan buah), Aren (penghasil nira, ijuk, pati, lidi, buah) dan sebagainya.

Adapun potensi vegetasi disepanjang rencana poros jalan diuraikan sebagai berikut:

### **Lokasi: Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

#### **a. Vegetasi Tingkat Pohon**

Vegetasi tingkat pohon (dbh > 20 cm) pada umumnya di dapatkan di lokasi rencana jalan poros Palu (Mamboro)- Parigi (Parigimpu) disusun oleh jenis-jenis, sebagai berikut: *Sterculia oblongata* (*Sterculiaceae*), *Pouteria firma* (*Sapotaceae*), *Lithocarpus favilandii*, (*Fagaceae*), *Eugenia obovata* (*Myrtaceae*), *Pterospermum celebicum* Miq (*Sterculiaceae*), *Pandanus* sp (*Pandanaceae*), *Calophyllum souletii* (*Clusiaceae*), *Santiria laevigata* (*Bursaraceae*), *Pangium edule* (*Staphyllaceae*), *Disoxylum alaiceum* (*Meliaceae*), *Arthocarpus teasmanii* (*Moraceae*), *Palaquium obovatum* (*Sapotaceae*) dan lain-lain. Jenis-jenis vegetasi tingkat pohon yang mempunyai Indeks Nilai Penting Tertinggi adalah *Sterculia oblongata* (*Sterculiaceae*) dengan nilai INP 25,85 %, diikuti oleh *Lithocarpus havilandii* dan *Eugenia densiflora* DC dengan nilai INP 19,82% dan 18,47%. Sedangkan vegetasi yang mempunyai nilai indeks Nilai Penting Rendah adalah *Cryptocarya crassinerviopsis* elmer dengan nilai INP 1,93%. Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah jenis *Lithocarpus havilandii* (Staf) Bennett dengan nilai KR sebesar = 6,72%, *Sterculia oblongata* R.Br dengan FR sebesar= 13,08% dan *Eugenia densiflora* DC dengan DR sebesar= 12,89%

**b. Vegetasi Tingkat Tiang (Poles)**

Vegetasi tingkat tiang (*poles*) pada umumnya disusun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Pouteria firma* Erlee (*Sapotaceae*), *Lithocarpus celebica* Blume (*Fagaceae*) *Pterospermum celebica* (*Sapindaceae*), *Elmerillia ovalis* (Miq), *Dandy*

(*Magnoliaceae*), *Octomeles sumatrana* (*Datisceae*), *Palaquium obovatum* (*Sapotaceae*), *Pandanus brachyspathus Marteli* (*Pandanaceae*), *Santiria silvestris*, (*Bursaraceae*), *Chionanthus nitens* (*Oleaceae*), *Cryptocarya laevigata* (*Lauraceae*), *Ficus sp* (*Moraceae*) “Patuyuu” *Macadamia hildebrandii*, *Arenga unditifolia* (*Arecaceae*), *Maccaranga mappa*, *Myristica fatua*, *Delenia serrata*, *Musaendopsis spec*, *Goniothalamus sp* (*Euporbiaceae*) dan lain-lain. Jenis vegetasi tingkat tiang yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah *Myristica fatua*, dan diikuti oleh *Ficus sp*, *Poutreria firma*. Sedangkan vegetasi tingkat tiang yang mempunyai nilai INP terkecil adalah *Castanopsis sp*. Jenis tiang yang dominan di lokasi ini adalah *Myristica fatua* diikuti jenis “baang” (*Ficus sp*) dengan masing-masing INP 18,23% dan 17,55%. Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Karapatan Relatif (KR) tertinggi, Frekuensi Relatif (FR) tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah jenis *Maccadamia hidebrandii* dengan nilai KR sebesar = 6,76%, *Myristica fatua* dan *Ficus sp* FR sebesar = 6,25% dan *Ficus sp* DR sebesar= 7,23%.

### c. Vegetasi Tingkat Pancang

Pada vegetasi tingkat Pancang, umumnya di susun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Santiria laevigata* (*Bursaraceaea*), *Aglaia sp* (*Meliaceae*), *Delinia serrata* (*Delinaceaea*), *Ficus stipulara* (*Moraceae*), *Belsmedia gigantocarpa* (*Lauraceae*) *Disxozyllum alaiceum* (*Meliaceae*), *Syzygium accuminatisima* (*Myrtaceae*), *Pinanga casea* (*Arecaceae*), *Ficus stipulare* (*Moraceae*), *Ipometia pinnata* (*Anacardiaceae*), *Calophyllum sp* (*Clusiaceae*), *Elmerillia ovalis* (*Magnoliaceae*) *Santiria laevigata*

(*Bursaraceae*), *Chionanthus nitens* (*Oleaceae*), *Elmerillia ovalis* (*Magnoliaceae*), *Myristica fatua* (*Myristicaceae*) *Gnetum gnemon* (*Gnetaceae*), *Litsea opositifolia* (*Lauraceae*), *Celtis philippinensis* (*Lauraceae*) dan lain-lain. Jenis vegetasi tingkat pancang yang mempunyai Indeks Nilai Penting tinggi adalah *Planchonella dulcitan* Blanco, disusul dengan *Celtis philippinensis* dengan nilai INP masing-masing = 23,03% dan 15,29%. Sedangkan Jenis yang INP terendah adalah jenis *Mangifera foetida* dengan nilai INP 2,16%.Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Karapatan Relatif (KR) tertinggi, Frekuensi Relatif (FR) tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah jenis *Planchonella dulcitan* Blanco, dengan nilai KR sebesar = 5,90%, FR sebesar = 8,12% dan DR sebesar= 9,21%.

#### **d. Vegetasi Tingkat Semai**

Pada vegetasi tingkat semai, tumbuhan bawah dan liana pada dasarnya disusun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Phyllanthus* sp, *Pinanga casea* “Nasovaya” *Freycentia de vriese*, “Bintangor” (*Callophyllum soulatri*), *Litsea formanii*, *Oropea celebica*, *Pilea* sp, *Elastotema* sp, *Syzygium accuminitisima*, *Eleocarpus gigantean*, *Dracaena angustifolis*, *Photos* sp, *Antidesma celebica*, ‘Valopayu’ (*Dinochloa barbata*), *Pterospermum celebicum*, *Chionanthus nitens*, *Santiria laevigata*, *Garcinia dulcis*, *Areca vestiaria*, *Tacca celebica*, *Pandanus sarasinorum*, “Lauro tohiti” (*Calamus inops*), *Turpinia spaerocarpa*, dan lain-lain. Jenis yang memiliki INP

tertinggi adalah *Discozylum alaiceum* dengan INP 12,53% dan diikuti oleh “Nasovaya” *Pterospermum celebicum* INP 10,21%, *Aglaia silvestris* INP 8,82%. Sedangkan jenis-jenis yang memiliki INP kecil (1,34%) adalah *Freycentia de vriese*, *Calamus solingeri*, *Pandanus sp*, *Arthocarpus teasmanii* dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Karapatan Relatif (KR) tertinggi adalah jenis *Discozylum alaiceum* dengan nilai (KR) sebesar 10,11% dan yang mempunyai Frekuensi Relatif (FR) tertinggi adalah jenis *Pterospermum celebicum*, dengan nilai KR sebesar = 9,70%.

#### **Lokasi: Hutan Lindung (HL)**

##### **a. Vegetasi Tingkat Pohon**

Vegetasi tingkat pohon (dbh > 20 cm) pada umumnya didapatkan di lokasi rencana jalan poros Palu (Mamboro) – Parigi (Parigimpu) disusun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Cananga odorata* Hook & Thomson (*Annonaceae*), *Lithocarpus celebica* (*Fagaceae*), *Santiria apiculata* (*Bursaraceae*), *Syzygium sp 1* (*Myrtaceae*), *Cannarium tigonum* H.Lam (*Bursaraceae*), *Syzygium sp 2* (*Myrtaceae*), *Magnolia condolli* (*Magnoliaceae*), *Cryptocarya crassinerviopsis* Koster (*Lauraceae*), *Prunus grisea* (*Rosaceae*), *Antidesma sp* (*Euphorbiaceae*), *Eleocarpus sp* (*Eleocarpaceae*), *Ficus sp* (*Moraceae*), *Pandanus sp* (*Pandanaceae*), *Calophyllum soulatri* (*Clusiaceae*), *Palaquium sp* (*Sapotaceae*), *Pangium edule* (*Staphyllaceae*), *Discozylum densiflorum* (*Meliaceae*) dan lain-lain. Jenis pohon yang mempunyai Indeks Nilai Penting tertinggi adalah *Cananga odorata* Hook & Thomson

(*Annonaceae*) dengan nilai INP 24,54%, dan diikuti oleh *Lithocarpus havilandii*, dengan Nilai 19,49%. Sedangkan jenis pohon yang mempunyai Indeks Nilai Penting terkecil adalah *Theaceae* INP 2,82%. Selanjutnya jenis-jenis pohon yang mempunyai nilai Kerapatan Relatif (KR) tertinggi adalah *Lithocarpus celebica* dengan KR sebesar 10,75%, dan yang mempunyai Frekuensi Relatif (FR) tertinggi adalah *Lithocarpus elegans* dengan nilai FR sebesar 6,41%, Sedangkan yang mempunyai nilai Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah jenis *Cananga odorata* Hook & Thomson, dengan nilai DR sebesar = 19,83%.

**b. Vegetasi Tingkat Tiang (Poles)**

Vegetasi tingkat tiang (pole) pada umumnya disusun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Ficus* sp1, *Lithocarpus elegans* (*Fagaceae*), *Syzygium* sp1 (*Myrtaceae*), *Castanopsis acuminatisima* (*Fagaceae*), *Dracaena angustifolia* (*Liliaceae*), *Cryptocarya crassionerviopsis* (*Lauraceae*), *Aglaia tomentosa* Teijsm (*Meliaceae*), *Knema* sp (*Myristicaceae*), *Ardisia celebica* Scheff (*Myrsinaceae*), *Baccaurea rasemosa* Reinw (*Euphorbiaceae*), *Palaquium* sp (*Sapotaceae*), *Myristica imperesa* (*Myristicaceae*), *Syzygium* sp2 (*Myrtaceae*), *Pandanus* sp (*Pandanaceae*) dan lain-lain. Jenis tiang yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah *Syzygium* sp (*Myrtaceae*) diikuti oleh *Castanopsis acuminatisima* (*Fagaceae*) dengan nilai INP sebesar 18,88%, dan 17,95%. Sedangkan vegetasi tingkat tiang yang mempunyai nilai INP terkecil adalah *Ficus* sp3 dengan nilai INP masing-masing 3,34%. Selanjutnya jenis-jenis pohon yang mempunyai nilai Kerapatan Relatif (KR) tertinggi adalah

Lithocarpus elegans dengan nilai KR sebesar 8,91%, dan yang mempunyai Frekuensi Relatif (FR) tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah Syzygium sp dengan nilai masing-masing FR sebesar 6,45%, DR sebesar 7,48%.

**c. Vegetasi Tingkat Pancang**

Vegetasi tingkat Pancang, umumnya di susun oleh jenis-jenis sebagai berikut: *Gnetum gnemon* (*Gnetaceae*), *Lithocarpus celebica* (*Fagaceae*), *Garcinia* sp (*Clusiaceae*), *Disoxylum densiflorum* (*Meliaceae*), *Goniothalamus* sp (*Annonaceae*), *Palaquium obovatum* (*Sapotaceae*), *Turpinia spaerocarpa* (*Staphylaceae*), *Castanopsis accuminatissima* (*Fagaceae*), *Polyosma integrifolia* (*Sabiaceae*), *Santiria laevigata* (*Bursaraceae*), *Knema* sp (*Myristicaceae*), *Syzygium* sp4 (*Myrtaceae*), *Ficus* sp2 (*Moraceae*), *Timonius* sp (*Rubiaceae*), *Psychotria malayana* Jack (*Rubiaceae*), *Disoxylum* sp (*Meliaceae*), *Ficus stipulare* (*Moraceae*), *Chionanthus nitens* (*Oleaceae*), dan lain-lain. Jenis vegetasi tingkat pancang yang mempunyai Indeks Nilai Penting tinggi adalah *Turpinia spaerocarpa* Hasak, disusul dengan *Pinanga casea* dan *Syzygium* sp4 dengan nilai INP masing-masing 20,54%, 18,48% dan 16,70%. Sedangkan jenis yang INP terendah adalah jenis *Horsfieldia costulata* (Miq.) Warb, dengan nilai INP 2,18%. Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Karapatan Relatif (KR) tertinggi, adalah jenis *Castanopsis accuminatissima*, dengan nilai KR sebesar 6,94%. Sedangkan yang mempunyai nilai Frekuensi Relatif (FR) tertinggi dan Dominasi Relatif (DR) tertinggi adalah jenis *Turpinia spaerocarpa* Hasak dengan nilai masing-masing sebesar 8,86%, dan 9,60%.

**d. Vegetasi Tingkat Pancang**

Vegetasi tingkat semai yang tumbuhan bawah ny pada dasarnya disusun oleh jenis-jenis sebagai berikut: Ficus sp (*Moraceae*), Santiria laevigata (*Bursaraceae*), Cannarium sp (*Bursaraceae*) Syzygium sp1 (*Myrtaceaea*), Lithocarpus celebica (*Fagaceae*), Elastotema sp (*Urticaceae*), Chionanthus nitens (*Oleaceae*), Donocloa sp (*Bombacaceae*), Dracaena angustifolia (*Liliaceae*), Baccaurea tetandra (*Euphorbiaceae*), dan lain-lain. Jenis yang memiliki Indeks Nilai Penting INP tertinggi adalah Syzygium sp3 dengan nilai INP sebesar 14,71% dan diikuti oleh Ficus sp3 sebesar 12,70%. Sedangkan jenis yang memiliki Indeks Nilai Penting INP kecil (1,42%) adalah Castanopsis accuminatizima Blume) Rheder dan lain-lain. Selanjutnya jenis-jenis yang mempunyai nilai Karapatan Relatif (KR) tertinggi adalah jenis Syzygium sp dengan nilai KR sebesar 10,33% dan yang mempunyai prosentase tingkat penyebaran (FR) tertiggi adalah Ficus sp dengan nilai FR sebesar 10,53%.

Selanjutnya, jenis-jenis hasil hutan bukan kayu dan tumbuhan bawah lainnya yang terdapat di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5 Jenis-jenis Hasil Hutan Non-Kayu yang terdapat di Kawasan Hutan Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung**

No	Nama	Nama Ilmiah	Potensi	Ket
1	Sirih hutan	Piper decumanum		K

2	Rotan nook	<i>Daemonorop robusta</i>		BK
3	Telang	<i>Clitorea ternatea</i>		K
4	Tohiti	<i>Calamus inops</i>	Tinggi	K
5	Ronti	<i>Calamus minahassae</i> (A)	Tinggi	K
6	Paku siatea	<i>Cyathea amboinensis</i>		BK
7	Anggrek tanah	<i>Spathoglotis plicata</i>		BK
8	Sirih-sirih	<i>Hockeria peltata</i>		BK
9	Anggrek bulan	<i>Paraphalaenopsis</i> sp.		K
10	Pakis	<i>Parkia</i> sp.		BK
11	Aren	<i>Arenga pinnata</i> (Wurb.) Merr.		K
12	Pandan hutan	<i>Pandanus sarasinorum</i> Warb.		BK
13	Paku pohon	<i>Cyathea amboinensis</i> Blume		BK
14	Rotan batang	<i>Calamus zollingerii</i>	Sedang	K
15	Akar kuning	<i>Smilax leucophylla</i>		BK
16	Bambu jalar	<i>Dinochloa barbata</i> (A)		BK
17	Kembang doa	<i>Asplenium</i> sp		BK
18	Gadung	<i>Dioscorea penthaphylla</i>		K
19	Kembang telang	<i>Clitorea ternatea</i>		BK
20	Paku liti	<i>Lygodium circinnatum</i> (Burn)		BK
		SW		
21	Palem	Palmae		BK

22	Pinang hutan	Areca sp	BK
23	Bambu	Bambusa spp.	K

**Keterangan:**

**K** = Komersial

**BK** = Belum Komersial

Dari hasil survei tim inventarisasi BPKH Wilayah XVI Palu, diketahui bahwa secara umum keberadaan jenis tetumbuhan berkayu dan bukan kayu pada hutan produksi yang masih dalam kategori hutan primer atau hutan sekunder di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung tidak berbeda jauh dengan keberadaan jenis di kawasan hutan lindung.

8. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung (Unit VI dan Unit IX) terdapat beberapa jenis flora dan fauna langka, tergolong endemic dan dilindungi. Jenis-jenis flora endemic langka dan dilindungi diantaranya jenis Kayu Ebony (*Diadpyros celebica Bakh*), Angrek bulan (*Paraphalaenopsis*) dan lain-lain. Jelasnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6 Jenis-jenis Flora Langka, Endemik dan dilindungi yang terdapat di Wilayah KPH Model Dolago Tanggunung**

No	Nama	Nama Ilmiah	STS	Keterangan
1	Ebony	Diospyros celebica Bakh	A	Dilindungi (3), Langka

2	Angrek bulan	<i>Pparaphalaenopsis</i> sp		Dilindungi (1)
3	Aren	<i>Arenga pinnata</i> (Wurb). Merr.		Dilindungi (1,2)
4	Bayur	<i>Pterospermum celebicum</i> Miq	B	Dilindungi (1,2)
5	Makaranga	<i>Macaranga hispida</i> Mull. Arg		Dilindungi (2)
6	Durian hutan	<i>Durio zibethinus</i>		Langka
7	Gofasa	<i>Vitex gofusus</i>		Langka
8	Pangi	<i>Pangium edule</i>		Langka
9	Agatis	<i>Agathis celebica</i>	B	Langka
10	Makadamia	<i>Macadamia hildebrandii</i>		Langka
11	Rotan batang	<i>Calamus zollingerii</i>	B	Langka
12	Rotan endemic Sulawesi	<i>Calamus ornatus</i> var. <i>celebicus</i>	B	Langka
13	Jongi	<i>Dillenia celebica</i>	B	Langka
14	Tambadaa	<i>Knema celebica</i>	B	Langka
15	Rotan endemic Sulawesi	<i>Korthalsia celebica</i>	B	Langka
16	Bambu jalar	<i>Dinochloa barbata</i>	B	Langka

---

Keterangan:

STS = Status

A = Endemik Sulawesi

- B = Endemik Sulawesi (Kessler et al, 2002)  
 C = Endemik Wallacea (Flora Malesiana)  
 1 = Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 1999  
 2 = Dilindungi, SK Mentah No. 54/Kpts/Um/2/1972 dilarang melakukan penebangan pohon  $\leq$  40 cm  
 3 = Permenhut No: P. 57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008- 2018

### 4.2.3 Pembagian Blok

Berdasarkan hasil tata hutan melalui analisis SIG, maka wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung dikelompokkan ke dalam 2 (dua) blok besar, yaitu Blok Hutan Lindung dan Blok Hutan Produksi. Pada Blok Hutan Lindung terdiri dari Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Sedangkan pada Blok Hutan Produksi terdiri dari Blok Pemanfaatan HHK HT, Blok Pemanfaatan HHK HA, Blok Pemanfaatan Kawasan, Blok Pemberdayaan Masyarakat, Blok Perlindungan, serta Blok Khusus. Deskripsi blok tiap fungsi dan kawasan hutan secara detil disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7 Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung**

No	Nama Blok	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	HL- Inti	(HL)	22.491	17
2.	HL- Pemanfaatan	(HL)	35.927	28
3.	HP- Perlindungan	(HPT)	1.320	1
4.	HP- Pemanfaatan HHK HA	(HPT/HP)	26.874	21
5.	HP- Pemanfaatan HHK HT	(HPT/HP)	22.276	17
6.	HP- Pemanfaatan Kawasan	(HPT)	8.313	6
7.	HP- Pemberdayaan Masyarakat	(HPT/HP)	7.187	6

8.	HP- Khusus	(HPT)	5.080	4
<b>Jumlah</b>			<b>129.467</b>	<b>100</b>

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah XVI Palu Tahun 2013

Berdasarkan tabel 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung pada hutan lindung didominasi oleh Blok Pemanfaatan yaitu seluas 35.927 ha, sedangkan pada hutan produksi didominasi oleh Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 26.874 ha. Secara umum, komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Dolago Tanggunung telah mengakomodir beberapa kepentingan yaitu ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari. Secara ekonomi dan ekologi, serta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat lokal, hal tersebut diharapkan dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Namun demikian jika dibandingkan dengan luas wilayah KPH, luas Blok Pemberdayaan Masyarakat masih relatif kecil untuk bisa dijadikan sebagai sarana dalam penyelesaian konflik lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih sedikitnya areal lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) dalam KPHP Model Dolago Tanggunung, yang mana hal tersebut menjadi salah satu kriteria dalam penentuan blok.

**Tabel 8 Pembagian Blok Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Dolago Tanggunung**

No	Nama Kawasan	Nama Blok	Jumlah Petak	Luas (Ha)
1.	KHL HL GN	HL Blok Inti	203	22.491
	Tanggunung	HL Blok Pemanfaatan	331	35.927

2.	KH HP Dolago Sausu	HP Blok Pemanfaatan	60	2.844
		HHK HA		
		HP Blok Pemanfaatan	194	10.739
		HHK HT		
3.	KH HP Kalora	HP Blok Pemanfaatan	20	1.255
		HHK HA		
4.	KH HP Sausu Trans	HP Blok Pemberdayaan	41	1.963
		Masyarakat		
		HP Blok Perlindungan	3	123
5.	KH HPT Dolago Sausu	HP Blok Pemanfaatan	333	17.227
		HHK HA		
		HP Blok Pemanfaatan	132	7.416
		HHK HT		
		HP Blok Pemanfaatan	51	3.024
		Kawasan		
		HP Blok Pemberdayaan	11	539
		Masyarakat		
		HP Blok Perlindungan	23	1.055
6.	KH HPT GN. Tanggunung	HP Blok Pemanfaatan	3	124
		HHK HA		
		HP Blok Pemanfaatan	90	5.289
		Kawasan		
7.	KH HPT Palolo	HPT Blok Khusus	85	5.080
		HP Blok Pemanfaatan	104	5.425
		HHK HA		
		HP Blok Pemanfaatan	81	4.120
		HHK HT		
		HP Blok Pemberdayaan	73	3.899

		Masyarakat		
		HP Blok Perlindungan	3	142
8.	KH HPT Sausu	HP Blok Pemberdayaan	16	786
		Masyarakat		
<b>Jumlah Sumber: Analisis</b>			<b>1.857</b>	<b>129.467</b>
<b>Spasial</b>				

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah XVI Palu Tahun 2013

Sehubungan dengan adanya perkembangan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung, seperti hadirnya IUPHHK HTI PT. Coltan Agro, hingga awal tahun 2013 termasuk hasil survei potensi biogeofisik dan sosekbud tahun 2011-2013 maka penataan blok pengelolaan akan memperhatikan areal-areal kawasan yang telah ada pemanfaatnya. Karena itu, pada areal KPH yang belum ada pemanfaatnya akan di blok kedalam pemanfaatan wilayah tertentu. Wilayah tertentu ini merupakan areal areal KPH yang dikelola langsung oleh pihak UPTD KPHP Dolago Tanggunung.

#### 1. Kawasan Hutan Lindung

Pada kawasan hutan lindung (HL), dikelompokkan ke dalam dua blok yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Blok inti pada kawasan HL ditetapkan dengan pertimbangan (sulit dijangkau atau akses rendah, penting bagi perlindungan tata air, perlindungan satwa dan plasma nutfah). Blok pemanfaatan pada kawasan HL ditetapkan dengan pertimbangan (memiliki potensi hasil hutan non kayu (rotan, getah, buah/biji), telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai kehidupan (berupa pertanian lahan kering/kebun). Atas dasar pertimbangan itu maka pada Blok pemanfaatan di kawasan

HL dibagi ke dalam petak-petak pemanfaatan sbb.: (a) untuk kawasan HL yang telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat dalam bentuk budidaya tanaman pertanian diarahkan menjadi blok/petak hasil hutan bukan kayu untuk hutan tanaman (HHBK-HT); (b) untuk kawasan HL yang cocok dikembangkan usaha jasa lingkungan dan telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat dalam bentuk budidaya tanaman pertanian/ hortikultura diarahkan menjadi blok/petak HHBK untuk wana wisata berbasis agrohutani (HHBK-WW-AH); dan (c) untuk kawasan HL yang telah lama dimanfaatkan masyarakat dalam pengumpulan rotan, getah damar, buah/biji dan masih berupa hutan alam diarahkan pemanfataannya menjadi blok/petak pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam (HHBK-HA). Kawasan hutan lindung di wilayah KPH Dolago Tanggunung memiliki luas areal sebesar  $\pm 58.418$  ha yang berdasarkan hasil tata hutan terbagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu Blok Inti seluas  $\pm 22.491$  ha dan Blok Pemanfaatan seluas  $\pm 35.927$  ha dengan deskripsi sebagai berikut:

**Blok Inti:**

- Blok ini merupakan blok yang diungsikan sebagai perlindungan tata air, perlindungan habitat jenis satwa endemik Sulawesi seperti Anoa, Babirusa dan jenis satwa lainnya. Blok ini sulit dimanfaatkan dan memiliki aksesibilitas rendah.

- Pada arahan RKTN/RKTP, termasuk dalam perlindungan hutan alam dan atau untuk stok karbon.
- Memiliki kelas lereng bervariasi agak curam sampai sangat curam. Berada pada ketinggian 1.400- 1.900m dpl.

**Blok Pemanfaatan:**

- Blok ini merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan yang berfungsi HL.
- Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, dan potensi hasil hutan non kayu (rotan, getah, buah/biji dan madu alam).
- Areal blok ini sebahagian dekat dan berbatasan langsung pemukiman masyarakat, seperti di Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo dan Tana Ntovea. Sebahagian telah dimanfaatkan masyarakat bagi kegiatan pertanian lahan kering, tempat pencarian rotan alam, buah/biji, madu alam dan lain-lain.
- Pada arahan RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan perlindungan hutan alam atau untuk kawasan rehabilitasi.
- Kondisi penutupan lahan adalah hutan lahan kering primer dan sekunder, pertanian lahan kering dan tanah-tanah terbuka, serta terdapat areal dalam kondisi lahan kritis.
- Memiliki aksesibilitas sedang-tinggi.
- Memiliki kelerangan yang bervariasi dari landai sampe curam.

2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di KPHP Model Dolago Tanggunug, memiliki luas yang paling tinggi yaitu  $\pm 71.050$  Ha, dimana berdasarkan hasil tata hutan terdiri dari 6 (enam) blok yaitu Blok Perlindungan seluas  $\pm 1.320$  Ha, Blok Pemanfaatan HHK-HA  $\pm 26.874$  Ha, Blok Pemanfaatan HHK-HT seluas  $\pm 22.276$  Ha, Blok Pemanfaatan Kawasan seluas  $\pm 8.313$  Ha, Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas  $\pm 7.187$  Ha, Blok Khusus  $\pm 5.080$  Ha, dengan deskripsi sebagai berikut:

**Blok Perlindungan:**

- Blok ini difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya (habitat flora dan fauna) dan direncanakan untuk tidak dimanfaatkan.
- Pada arahan RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam, kawasan rehabilitasi hutan dan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar dan skala kecil.
- Termasuk dalam kriteria kawasan lindung. Jenis tanah peka erosi, kelas lereng curam sampai sangat curam dan curam hujan tinggi.
- Direncanakan untuk tidak dimanfaatkan untuk perlindungan tata air dan perlindungan lainnya (flora dan fauna).
- Kondisi penutupan lahan adalah tidak berhutan (semak belukar) dan sedikit hutan lahan kering sekunder.
- Memiliki aksesibilitas rendah-sedang.

**Blok Pemanfaatan HHK-HA:**

- Blok ini merupakan blok yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HA sesuai potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
- Arahan pada RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan hutan untuk pengusaha skala besar.
- Kondisi penutupan lahan adalah hutan lahan kering primer dan sekunder. Potensi hutan alam primer di kawasan HPT untuk seluruh jenis dari diameter  $20 > 60$  cm sebesar 36,76-88,69 m<sup>3</sup>/Ha. Pada hutan alam sekunder di kawasan HPT sebesar 36,76 m<sup>3</sup>/Ha dan pada pertanian lahan kering di kawasan HP sebesar 7,59 m<sup>3</sup>/Ha. Untuk areal dengan potensi  $< 40$  m<sup>3</sup>/Ha diskemakan kedalam program HHK-HA.
- Potensi tegakan termasuk kategori rendah-tinggi untuk seluruh jenis (jenis kayu komersial dan non komersial).
- Memiliki aksesibilitas rendah-sedang.
- Memiliki kelerengan yang bervariasi dari landai sampai curam.

**Blok Pemanfaatan HHK-HT:**

- Blok ini merupakan blok yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan, serta telah ada ijin pemanfaatan HHK-HT yaitu IUPHHK-HT PT. Coltan Agro.

- Arahan pada RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk perusahaan skala besar dan kecil.
- Kondisi penutupan lahan adalah tidak berhutan (pertanian dan semak)
- Potensi tegakan termasuk kategori rendah, yaitu 7,59 m<sup>3</sup>/Ha (0-17m<sup>3</sup>/Ha) untuk seluruh jenis pada diameter 20>60 cm.
- Terdapat perambahan oleh masyarakat.
- Memiliki aksesibilitas sedang-tinggi
- Memiliki kelerengan landai-agak curam.

**Blok Pemanfaatan Kawasan:**

- Blok ini merupakan blok pemanfaatan kawasan bagi kegiatan non-kehutanan. Pada blok ini telah ada ijin pemanfaatan kawasan (KP) IUP tambang PT. Citra Palu Mineral (CPM) untuk mineral tambang emas. Kehadiran Blok ini sesuai proses tata hutan. Untuk IUP PT. CPM masih perlu menunggu ijin eksploitasi (IPPKH) dari Kemenhut, karena hingga saat ini masih sebatas ijin eksplorasi.
- Arahan pada RKTN/RKTP adalah kawasan untuk perlindungan Hutan Alam atau kawasan untuk rehabilitasi atau kawasan hutan untuk perusahaan hutan skala besar atau kawasan hutan untuk pengusaha hutan skala kecil.
- Ada potensi jasa lingkungan (sumber air bagi kehidupan masyarakat kawasan bawahannya), wisata alam, hasil hutan non kayu.

**Blok Pemberdayaan Masyarakat:**

- Blok ini merupakan blok yang telah ada kegiatan pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat dalam bentuk pertanian lahan kering, namun upaya pemberdayaan masyarakat secara legal belum ada. Karena itu, blok diskemakan masuk kedalam pemberdayaan masyarakat secara legal sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Hutan Kemasyarakatan(Hkm), Hutan Desa (HD) dan lain-lain. Sesuai potensi yang ada, blok ini direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat (PHBM) sebagaimana telah dihasilkan dalam proses tata hutan.
- Arahan pada RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan unuk perusahaan skala besar dan kecil.
- Kondisi penutupan lahan adalah tidak berhutan (pertanian dan semak belukar).
- Potensi tegakan termasuk kategori rendah.
- Perambahan oleh masyarakat sangat tinggi.
- Memiliki aksesibilitas sedang-tinggi.
- Dekat dengan pemukiman dan terdapat akses jalan masuk kawasan seperti jalan eks, HPH.

**Blok Khusus:**

- Blok ini merupakan blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPH Dolago Tanggunung. Di wilayah KPH ini telah ada izin KHTDK bagi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu berdasarkan izin Kemenhut. KHTDK Unismuh Palu adalah untuk kegiatan pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa dosen dan peneliti.

- Arahan pada RKTN/RKTP, dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam untuk kawasan rehabilitasi dan untuk kawasan hutan pengusahaan skala besar dan kecil.

### 3. Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu merupakan wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis spasial di KPHP Model Dolago Tanggunung, wilayah tertentu secara keseluruhan berada di fungsi kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas serta beradadalam blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam maupun hutan tanaman.

Wilayah tertentu di areal ini memiliki luas total  $\pm$  19.263 ha atau sebesar 15% dari luas wilayah KPHP Model Dolago Tanggunung seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 9 Fungsi dan Luas Kawasan Hutan**

No	Nama Wilayah Tertentu	Fugsi Kawasan Hutan>Nama Blok	Jumlah Petak	Luas (Ha)
1	<b>Nupa Bomba</b> Kec. Tana Ntovea Kab. Donggala	HPT Blok Pemanfaatan	3	124
		HHK-HA		
		<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>124</b>
2	<b>Olaya Olobaru</b> Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong	HPT Blok Pemanfaatan	6	420
		HHK-HA		
		HPT Blok Pemanfaatan	10	590
		HHK-HT		
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>1.010</b>
3	<b>Sungai Tindaki</b> Kec.Parigi Selatan	HP Blok Pemanfaatan HHK-HA	1	23

	Kab. Parigi Moutong	HP Blok Pemanfaatan HHK-HT	3	163
		<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>206</b>
4	<b>Sausu</b>	HP Blok Pemanfaatan HHK-HA	15	660
	Kec. Sausu			
	Kec. Balinggi	HP Blok Pemanfaatan HHK-HT	25	1.239
	Kec. Torue			
	Kab. Parigi Moutong	HPT Blok Pemanfaatan HHK-HA	139	7.233
		HPT Blok Pemanfaatan HHK-HT	43	2.554
		<b>Jumlah</b>	<b>222</b>	<b>11.686</b>
5	<b>Sungai Torono</b>			
	Kec. Sausu	HP Blok Pemanfaatan HHK-HA	20	1.255
	Kab. Parigi Moutong			
		<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>1.255</b>
6	<b>Lemban Tongoa</b>			
	Kec. Palolo	HPT Blok Pemanfaatan HHK-HA	11	540
	Kab. Sigi			
		HPT Blok Pemanfaatan HHK- HA	8	260
		<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>800</b>
7	<b>Tongoa</b>			
	Kec. Palolo	HPT Blok Pemanfaatan HHK-HA	12	620
	Kab. Sigi			
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>620</b>
8	<b>Sungai Wuno</b>			
	Kec. Sigi Biromaru	HPT Blok Pemanfaatan HHK-HA	41	2.411
	Kab. Sigi			
		HPT Blok Pemanfaatan HHK-HT	22	1.171
		<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>1.171</b>
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>359</b>	<b>19.263</b>

4. SK Menteri Blok Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat sekitar kawasan hutan sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo PP No. 3 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, maka di keluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.515/Menhut-II/2013 tanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan se luas  $\pm 590$  Ha (lima ratus sembilan puluh hektar) yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan Pasal 93 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) dan juga berdasarkan Pasal 7, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut/2011, Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri berada pada kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani “Lestari Permai” yang berjumlah 55 orang yang berdomisili di Desa Bakubakulu Kabupaten Sigi dengan jangka waktu pengelolaan 35 tahun (tiga puluh lima) dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun yang

seluruhnya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sebagaimana dengan Keputusan Bupati Sigi No. 522.1-179 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ±590 kepada Kelompok Tani Lestari Permai di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi bahwa kelompok tani tersebut mempunyai hak, yaitu: mendapatkan fasilitasi, melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, melakukan penanaman tanaman hutan berkayu, melakukan kegiatan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dari hasil penanamannya dan juga mempunyai kewajiban seperti melakukan penataan batas areal kerja, menyusun rencana kerja, melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, membayar Provinsi Sumber Daya Hutan dan pungutan lainnya sesuai ketentuan serta menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin.

#### **4.2.4 Pembagian Petak**

Pembagian petak didasarkan pada produktivitas dan potensi areal, kawasan lindung (gambut, resapan air, sempadan pantai, sungai dan danau, mata air, cagar budaya, rawan bencana, perlindungan plasma nutfah, pengungsian satwa dan panati berbakau), selain itu didasarkan pada rancangan areal untuk pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pemberdayaan masyarakat. Pembagian petak ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.

Berikut ini tabel Penyelarasan antara Rancangan Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP dengan Arahan Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK:

**Tabel 10 Pembagian Blok Pada Wilayah KPHL dan KPHP**

<b>Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK</b>	<b>Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL</i>		
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	- Blok Inti - Blok Pemanfaatan - Blok Khusus	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
Kawasan	untuk - Blok Inti	Kawasan rehabilitasi

Rehabilitasi	- Blok Pemanfaatan	(dalam
	- Blok Khusus	RKTN/RKTP/RKTK)
		menjadi acuan awal dalam
		merancang Blok yang
		dapat berupa Blok Inti atau
		Blok Pemanfaatan atau
		Blok Khusus pada HL
		sesuai potensi yang ada.

***Blok pada wilayah KPHL***

***dan KPHP yang***

***berfungsi HP***

Kawasan untuk	- Blok Perlindungan	Kawasan untuk
perlindungan Hutan Alam	- Blok Pemanfaatan	perlindungan Hutan Alam
dan Lahan Gambut	Kawasan, Jasa	dan Lahan Gambut (dalam
	Lingkungan dan HHBK	RKTN/RKTP/RKTK)
	- Blok Khusus	menjadi acuan awal dalam
		merancang Blok yang
		dapat berupa Blok
		Perlindungan atau Blok
		Pemanfaatan Kawasan,
		jasa Lingkungan dan

			HHBK atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan Rehabilitasi	untuk	- Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK - Blok Pemanfaatan HHK-HT - Blok Pemberdayaan Masyarakat - Blok Khusus	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam erancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan pengusahaan hutan skala besar	untuk	- Blok Perlindungan - Blok Pemanfaatan K	Kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar (dalam RKTN/RKTP/RKTK)

		menjadi awal dalam
	awasan, Jasa Lingkungan dan HHBK	merancang Blok yang dapat berupa Blok
	- Blok Pemanfaatan HHK- HA	Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan,
	- Blok Pemanfaatan HHK- HT	Jasa Lingkungan dan HHBK atau Blok
	- Blok Pemberdayaan Masyarakat	Pemanfaatan HHK-HT, atau Blok Pemberdayaan
	- Blok Khusus	Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk pengusaha hutan skala kecil	- Blok Perlindungan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK	Kawasan untuk pengusaha hutan skala kecil (dalam RKTN/RKTP/RKTK)
	- Blok Pemanfaatan HHK- HT	menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang
	- Blok Pemberdayaan Masyarakat	dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok
	- Blok Khusus	Pemanfaatan Kawasan,

---

Jasa Lingkungan dan  
HHBK atau Blok  
Pemanfaatan HHK-HT  
atau Blok Pemberdayaan  
Masyarakat atau Blok  
Khusus pada HP sesuai  
potensi yang ada.

*Sumber: Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, 2012*

### **4.3 Kesiapan Masyarakat**

Dalam pembangunan HKm di desa ini, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pengelolaan HKm adalah kesiapan masyarakat. Dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan dibutuhkan orang-orang yang siap kerja dan bertanggung jawab pada porsinya masing-masing. Menurut Rusli (2006) mengungkapkan bahwa kesiapan kerja diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan tanpa mengalami kesulitan, hambatan, dengan hasil maksimal dan target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai kesiapan kerja, mereka akan mampu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut sesuai harapan tanpa mengalami kesulitan dan hambatan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pada penelitian ini ada 55 responden yang mengisi kusioner serta wawancara mendalam. Berikut hasil dari penelitian kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu:

Dengan 3 (tiga) kategori jawaban:

No	Kategori Kesiapan	Skor Jumlah Informan	Nilai Skor Akhir ( Skor x Jumlah Informan)
1	Tidak Siap	1	$1 \times 9 = 9$
2	Kurang Siap	3	$3 \times 19 = 57$
3	Siap	5	$5 \times 27 = 135$
			$9 + 57 + 135 = 201$

Jumlah skor tertinggi =  $5 \times 55 = 275$

Jumlah skor terendah =  $5 \times 1 = 5$

Dalam teknik pengumpulan data (qusioner), instrument tersebut disebarkan kepada 55 responden yang semuanya tergolong kelompok tani, kemudian direkapitulasi. Berikut hasil dari data 55 responden serta kategori nya:

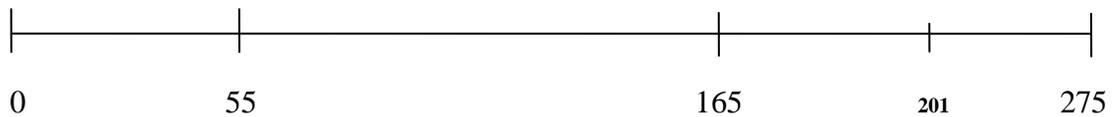
Tabel hasil rekapitulasi:

No	Kategori Kesiapan	Skor Jumlah Infroman	Nilai Skor Akhir (Skor x Jumlah Infroman)
1	Tidak Siap	1	$1 \times 9 = 9$
2	Kurang Siap	3	$3 \times 19 = 57$
3	Siap	5	$5 \times 27 = 135$
			Jumlah: $9 + 57 + 135 = 201$

Jumlah skor tertinggi=  $5 \times 55 = 275$

Jumlah skor terendah =  $1 \times 55 = 55$

Berdasarkan data yang diperoleh dari 55 responden, maka kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu terletak pada daerah siap. Secara kontinum dapat dilihat seperti ini:



Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 55 responden, maka kesiapan masyarakat di Desa Bakubakulu, yaitu  $201/275 \times 100\% = 73,09\%$  tergolong kuat.

Selain mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat dalam hal ini kelompok tani, penelitian ini juga mencari tau bagaimana persepsi atau pemahaman tentang pengertian Hutan Kemasyarakatan melalui wawancara mendalam dan hasilnya adalah sebagian masyarakat belum memahami apa itu Hutan Kemasyarakatan serta manfaat yang akan dirasakan oleh mereka sendiri nantinya. Rendahnya pemahaman masyarakat ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah, masyarakat juga mengakui bahwa dalam rencana pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di desa ini mulai dari SK Penetapan Areal Kerja Hkm sampai pada tahun ini sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait hanya dua kali saja.

Program HKm baik pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi masih belum menjadi program prioritas sehingga anggaran untuk HKm kurang memadai/terbatas. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dalam implementasi HKm menjadi terhambat. Menurut Suhirman dkk. (2012), pemerintah daerah mempunyai peran sentral dalam kebijakan HKm, tidak

hanya untuk menerbitkan izin dan pemanfaatan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan fasilitasi bagi pengembangan HKm di wilayahnya mulai perencanaan, inisiasi, pendampingan, pengusulan sampai pembiayaan. Hal ini menunjukkan masih adanya persepsi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang menganggap bahwa sebagai program dari pemerintah pusat, pendanaan HKm juga seharusnya berasal dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) baik secara langsung maupun melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan. Menurut Suhirman dkk. (2012), kondisi ini diperparah dengan status bidang kehutanan sebagai urusan pilihan, keterbatasan anggaran dan personil lapangan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat adalah tidak adanya pendampingan dari dinas terkait. Bagi masyarakat yang sangat tergantung dengan kawasan hutan, HKm memberikan keamanan dan kepastian dalam melakukan pengelolaan HKm sebagai sumber pendapatan. Bagi pemerintah daerah, HKm dianggap sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat yang memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mendapatkan manfaat dengan tetap menjaga fungsi hutan. Sementara bagi pemerintah pusat, HKm selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk mempertahankan kawasan hutan terutama bagi kawasan yang sudah terlanjur digarap oleh masyarakat. Oleh sebab itu Pengembangan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan lahan, dan pengembangan kewirausahaan merupakan tiga kunci penting yang harus mendapatkan dukungan dari

berbagai pihak terkait sesuai dengan perannya masing-masing agar implementasi HKm dapat berjalan sesuai dengan tujuan HKm yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Kondisi ini sejalan dengan Kaskoyo dkk. (2014) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan implementasi HKm, pemberdayaan masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan harus dibangun sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk mengelola hutan secara lestari. Pendampingan dari LSM, universitas, pemerintah, dan stakeholder lain juga diperlukan agar petani dapat mengimplementasikan HKm dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. KPH Dolago Tanggunung tergolong siap dalam penerapan kebijakan Perhutanan Sosial. Hal ini dibuktikan melalui kesiapan KPH dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang disyaratkan dalam penerapan skema-skema perhutanan sosial.
2. Masyarakat tergolong sangat siap dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, dibuktikan melalui respon mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program HKm . Meskipun demikian, dari sisi tingkat pengetahuan mereka terhadap sejauhmana manfaat program HKm bagi mereka masih perlu ditingkatkan.

#### **5.2 Saran**

Rendahnya pengetahuan masyarakat atau kelompok tani tidak lepas dari pemerintah setempat. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah yang terlibat melakukan sosialisasi bahkan pendampingan yang rutin sehingga pengelolaan HKm ini bisa berjalan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adi Riyanto. 2011. *Elemen Pemberdayaan Interaksi KelompokTani.html*
- Amongraga,C. 2008,Mengenal Program PHBM, <http://www.infojawa.orang>
- Awang, S. A. 2002. *Social Forestry, belajar dari lapangan*. Warta FKKM Vol 5 No. 9 September 2002
- A. Duklo. Pengertian dan Karakteristik Kelompok Tani Hutan-melalui <http://silvamerauke.blogspot.co.id> [12/4/2015]
- Bandura, A. 2001. Social Cognitive Theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*.52(1), PP.1-26. Available at: <http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.physc52.1.1>
- Brady. 2009. *Pengertian Kesiapan Kerja*. <http://agusseptianheryanto.wordpress.com/2013/11/22/kesiapan-kerja>. [Diakses 14 Februari 2014].
- Elvida, 2009. Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kkuala Kupak. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol 6 No 1. April 2004:57-70.
- Hiadayat, 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekan baru: Suska Pres.
- Inggrid, 2015. Kesiapan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.
- Joko Sutisno. 2007. *Pengertian Kesiapan Kerja Secara Umum, Jawa*. [Diakses 10 Maret 2014].
- Kasiran, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: UIN Press, 2010).
- Moleong, Lexi J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbut PT*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mukhtar, S. Dan Kliwon Hidayat. 2010. Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kaerifan Lokal : Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *Jurnal WACANA Vol.13. (1).132-51*.

- Nikadek,S, 2016. Kesiapan KPH Terhadap Renacana Pembangunan HKm di Desa Kilo Kabupaten Poso Pesisir Utara.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Prasetyo A.B, 2013. Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui [http://www.bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HKm.html.c\(08/03/2016\)](http://www.bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/seluruh-artikel/14-hutan-kemasyarakatan-HKm.html.c(08/03/2016)
- Rahardjo, B. Dan R. Isnaini. 2006. Study Banding Internasional Model Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Mt.Kitanglad Range Natural Park, Philippines, 4 12 Maret 2006. Lembaga Alam Tropika Indonesia. Bogor/
- Ridwan, Engkos AK. (2006). *Cara Menggunakan Dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- S. Punaji, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Yuniati, S. 2002. CFM (Community Forestry Management) Policy Development: *Context and strategy. Experience from industry*.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (Hutan Kemasyarakatan di Desa Bakubakulu)



Gambar 2. Batas Kawasan Wilayah Hutan Kemasyarakatan yang termasuk pada Hutan Produksi



Gambar 3. Salah satu tanaman yang berada pada areal Hutan Kemasyarakatan



Gambar 4. Bersama Kelompok Tani dan Masyarakat setempat



Gambar 5. Wawancara bersama Kepala KPH Dolago Tanggunung



## **BIODATA PENULIS**

**Ingrid Margareth Possumah**, lahir pada tanggal 02 Maret 1993 di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenjang pendidikan dasar di SD Karuna Dipa (2004), SMP Negeri 2 Palu (2007), lulus pendidikan menengah atas paa SMA Negeri 1 Palu (2010), serta menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako (2014), Pada tahun 2015 penulis berkesempatan melanjutkan studi Pascasarjana (S2) pada program Studi Magister ilmu pertanian, Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah.